

**FUNGSI ORGANIZING BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
DALAM MENGATASI BENCANA BANJIR DI
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

SKRIPSI

Oleh :

MAYANG SARI

NPM : 1903100017

**Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Drs. H.
SYAFRIZAL, M.Si, Ph.D.
Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi Pembangunan**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2023

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Mahasiswa : **MAYANG SARI**
NPM : 1903100017
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari, tanggal : Kamis, 31 Agustus 2023
Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si**

PENGUJI II : **IDA MARTINELLI, S.H., MM**

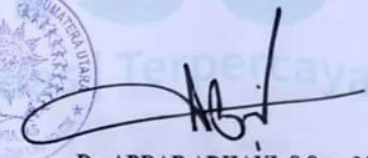
PENGUJI III : **Assoc. Prof. Drs. H. SYAFRIZAL, M.si.Ph.D.**

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP


Dr. ABRAR ADHANI, S.Sos., M.LKom



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan Skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh:

Nama Mahasiswa : **MAYANG SARI**
NPM : 1903100017
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Fungsi Organizing Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Mengatasi Bencana Banjir Di Kabupaten Serdang Bedagai

Medan, Agustus 2023

PEMBIMBING

Assoc. Prof. Drs. H. Syafrizal, M.si, Ph.D.
NIDN.

Disetujui Oleh :

KETUA PROGRAM STUDI

ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP
NIDN. 0122/18801

DEKLAN

Dr. ARIEINSALEH, S.Sos., M.SP
NIDN. 0030017402

PERNYATAAN

Dengan ini saya , Mayang Sari NPM 1903100017 menyatakan dengan sungguh-sungguh

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dengan segala bentuk yang dilakukan undang-undang termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain adalah Tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil dari tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya plagiat, atau jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya penuh diajukan untuk memperoleh kesejahteraan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat ditulis atau terbitkan oleh orang lain, kecuali secara penuh di acu dalam naskah ini dan sebutkan dalam daftar Pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya sedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan Kembali gelar sarjana yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, September 2023

Penulis

METERAN
TEMBAK
10000
JACAKX612125056

Mayang Sari

1903100017

ABSTRAK

FUNGSI ORGANIZING BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) DALAM MENGATASI BANJIR DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Mayang Sari

1903100019

Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana di Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Daerah berwenang dan bertanggungjawab secara bersama/konkuren dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dimana penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu, menyeluruh, terkoordinasi yang melibatkan semua potensi yang ada di daerah. Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui lebih dalam tentang fungsi Organizing Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam mengatasi bencana banjir di Kabupaten Serdang Bedagai. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif, data yang diperoleh melalui pengumpulan data kemudian diinterpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan dan diperoleh melalui wawancara. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan menunjukkan bahwa Fungsi Organizing Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam mengatasi bencana banjir di Kabupaten Serdang Bedagai sudah berjalan dengan semestinya tetapi masih belum maksimal, hal ini disebabkan masih adanya permasalahan seperti masih terdapat sarana yang seharusnya dibutuhkan dalam meningkatkan kualitas kerja, tetapi sarana tersebut tidak ada sama sekali seperti strategi untuk mencapai tujuan karena sangat minim di anggaran, kurangnya personil kelompok disetiap bidang dan hal penting lainnya. Pengarahan langsung yang kurang maksimal dalam pelaksanaannya, serta kerja sama yang dilakukan belum efektif.

Kata Kunci : Fungsi, Fungsi Organizing, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirabbil'alamiin segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wata'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya secara terus menerus sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu. Tidak lupa shalawat beriringan salam penulis hadiahkan kepada baginda Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Adapun judul skripsi adalah “ **FUNGSI ORGANIZING BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) DALAM MENGATASI BENCANA BANJIR DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**” guna untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik (S.AP) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terima kasih sebesar-besarnya kepada yang tersayang Ayah Saparuddin dan Mama Erna Wati Tampubolon untuk semua kepercayaan yang diberikan penuh kepada penulis, mendukung pertumbuhan dan Pendidikan penulis serta untuk segala doa yang terus mengalir di setiap Langkah penulis.

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
2. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Dr. Abrar Adhani, S.Sos., M.I.Kom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dra. Hj. Yurisna Tanjung, M.AP selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos., M.SP selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Bapak Dr. Jehan Ridho Izharsyah, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Assoc. Prof. Drs. H. Syafrizal, M.Si, Ph.D. selaku pembimbing saya yang telah meluangkan waktunya, memberikan arahan, semangat dan nasehat dalam penulisan skripsi saya.
8. Seluruh Dosen dan Staf Pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah mempermudah dan memberikan informasi-informasi terkait perkuliahan.
9. Bapak/Ibu staf pegawai di Kantor BPBD Kab Serdang Bedagai khususnya kepada Bapak Kepala Pelaksana yang telah memberi izin penulis dalam melakukan penelitian skripsi ini.
10. Kepada sahabat penulis Khairunnisa, Ananda Nazli, Alike Putri yang telah memberikan dukungan dan semangat yang tiada henti.
11. Terimakasih juga buat teman terbaik penulis Salma Indah Sari, Febrianti Alda, Yollanda Febriani, Sri Rezekina, dan Febri Yolanda yang selalu

membantu dan mendukung selama penulis mengikuti perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.

12. Ucapan Terimakasih juga saya sampaikan kepada Teman-teman seperjuangan IAP 2019 yang sudah bersama-sama melewati proses belajar dengan penulis.

Terimakasih juga untuk yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah bekerja sama dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan mereka. Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita kembalikan semua urusan dan mudah-mudahan skripsi ini dapat kiranya memberikan manfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Medan, September 2023

Penulis

Mayang Sari

1903100017

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 6Tujuan penelitian dan Manfaat Penelitian.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II. URAIAN TEORITIS.....	8
2.1 Fungsi.....	8
2.1.1 Pengertian Fungsi.....	8
2.2 Fungsi Pengorganisasian.....	8
2.2.1 Pengertian Fungsi Pengorganisasian.....	8
2.3 Pengorganisasian (<i>Organizing</i>).....	9
2.3.1 Pengertian Pengorganisasian (<i>Organizing</i>).....	9
2.3.2 Teori-Teori Pengorganisasian (<i>Organizing</i>).....	11
2.3.3 Tahapan Pengorganisasian (<i>Organizing</i>).....	13
2.3.4 Proses Fungsi Pengorganisasian (<i>Orgaanizing</i>).....	14
2.3.5 Prosedur dalam proses Pengorganisasian (<i>Organizing</i>).....	15
2.3.6 Manfaat fungsi Pengorganisasian (<i>Organizing</i>).....	16

2.3.7 Pengorganisasian sebagai salah satu fungsi manajemen.....	16
2.3.8 Ciri-Ciri Organisasi.....	17
2.3.9 Unsur dalam Pengorganisasian (<i>Organizing</i>).....	17
2.3.10 prinsip-prinsip Pengorganisasian (<i>Organizing</i>).....	18
2.4 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).....	19
2.4.1 Pengertian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).....	19
2.4.2 Tugas pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)....	20
BAB III. METODE PENELITIAN.....	22
1.1 Jenis Penelitian.....	22
1.2 Kerangka Konsep.....	23
1.3 Definisi Konsep.....	24
1.4 Kategorisasi Penelitian.....	25
1.5 Informan.....	25
1.6 Teknik Pengumpulan Data.....	26
1.7 Teknik Analisis Data.....	27
1.8 Waktu dan Lokasi Penelitian.....	28
1.9 Deskripsi Objek Penelitian.....	28
1.9.1 Informasi BPBD Serdang Bedagai.....	29
1.9.2 Visi Dan Misi BPBD Serdang Bedagai.....	30
1.9.3 Tujuan dan Sasaran Organisasi.....	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
4.1 Hasil Penelitian.....	33
4.2 Pembahasan.....	45
BAB V PENUTUP.....	61
5.1 Simpulan.....	61

5.2 Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konsep.....	23
Gambar 3.2 Peta rawan banjir Kab Serdang Bedagai.....	29
Gambar 3.3 Struktur Organisasi.....	32

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Lembar Pengesahan
- Lampiran II : Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran III : Surat Pernyataan
- Lampiran IV : Dokumentasi Penelitian
- Lampiran V : SK-1 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
- Lampiran VI : SK-2 Surat Keterangan Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
- Lampiran VII : SK-3 Permohonan Seminar Proposal
- Lampiran VIII : SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran IX : Pedoman Wawancara
- Lampiran X : Surat Keterangan Izin Penelitian
- Lampiran XI : Surat Keterangan Selesai Penelitian
- Lampiran XII : SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran XIII : Surat Keterangan Bebas Pustaka
- Lampiran XIV : SK-10 Undangan/Panggilan Ujian Skripsi
- Lampiran XVI: Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Bencana banjir hampir setiap musim melanda Indonesia. Berdasarkan nilai kerugian dan frekuensi kejadian bencana banjir terlihat adanya peningkatan yang cukup berarti. Bencana banjir dipengaruhi oleh faktor alam berupa curah hujan yang di atas normal dan adanya pasang naik air laut. Disamping itu faktor ulah manusia berperan penting seperti penggunaan lahan yang tidak tepat, Pembuangan sampah kedalam sungai dan pembangunan pemukiman didaerah dataran banjir

Banjir merupakan suatu masalah yang sampai saat masih perlu adanya penanganan khusus dari berbagai pihak, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Sedikitnya ada lima faktor penting penyebab banjir di Indonesia yaitu faktor hujan, faktor hancurnya retensi daerah aliran Sungai (DAS), faktor kesalahan perencanaan pembangunan alur sungai, faktor pendangkalan sungai dan faktor kesalahan tata wilayah dan pembangunan sarana dan prasarana.(Ligal, 2008)

Pemerintah yang bertanggung jawab dalam hal penanggulangan bencana adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang disingkat BNPB yang merupakan wadah yang bersifat non struktural bagi penanggulangan bencana yang berada di bawah Presiden dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Sedangkan BNPB memiliki cabang di setiap provinsi disebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Penanggulangan yang dilakukan BPBD adalah pra atau pasca bencana alam. Untuk proses penanggulangan pasca alam meliputi penanganan korban serta pendistribusian logistic.(Mahdia, 2013: 2).

Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Daerah berwenang dan bertanggung jawab secara bersama/konkuren dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dimana penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu, menyeluruh, terkoordinasi.

Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai mempunyai tugas dan wewenang memberikan perlindungan dan memenuhi hak dasar yang secara nyata dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ketahanan sosial sesuai dengan karakteristik dan risiko bencana. Bahwa secara geografis, klimatologis, hidrologis dan kondisi sumberdaya alam Kabupaten Serdang Bedagai merupakan daerah rawan bencana, baik yang disebabkan oleh alam, non alam maupun perbuatan manusia yang berpotensi menimbulkan korban jiwa, pengungsian, kerugian harta benda dan kerugian lainnya.

Banjir kembali melanda beberapa titik di Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di kecamatan Sei Rampah, sehubungan dengan kejadian bencana banjir bandang yang terjadi pada hari senin malam tanggal 10 Desember 2022 dimana penyebab terjadinya banjir bandang tersebut adalah hujan deras kurang lebih 4 hari berturut-turut yang mengakibatkan tanggul sungai Rampah jebol hingga mengakibatkan perumahan sekitar terendam air dan semua warga yang berada di sekitar tersebut dievakuasi dan mengungsi ke tempat yang lebih aman.

Sekitar 32.645 orang terdampak banjir. Hujan lebat pun diperkirakan masih terjadi di sejumlah daerah di Sumut dalam tiga hari ke depan. Pemerintah Daerah diminta meningkatkan pada bencana banjir. ”tanggul Sungai Rampah jebol,

membuat aliran air sungai meluap ke permukiman warga. Air pun belum surut karena debit sungai masih tinggi,” kata kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Serdang Bedagai Frits Damanik. Frits mengatakan ada tiga kecamatan yang terdampak banjir, yakni Sei Rampah, Tanjung Beringin, dan Sei Bamban. Dua kecamatan pertama dampaknya parah karena berada di dekat sungai yang meluap, ketinggian air 20-70 sentimeter.

Korban banjir yang mereka data semakin banyak dibandingkan hari pertama dan kedua yang masih 4.613 keluarga yang terdiri atas 17.554 jiwa. Saat ini, korban bertambah menjadi 8.950 keluarga yang terdiri atas 32.645 jiwa. Di setiap tahunnya kabupaten Serdang Bedagai selalu mengalami korban bencana banjir.

Pemerintah Daerah bertanggung jawab melindungi dan mensejahterakan setiap warga yang berada di wilayah kerjanya secara demokratis.

- Ada semangat untuk pengembangan potensi sumber daya daerah yang terkait dengan upaya penanggulangan bencana daerah.
- Merupakan amanat untuk mengimplementasikan kegiatan Pengurangan Resiko Bencana hingga ke pemerintah daerah.
- Merupakan kewajiban meningkatkan kinerja pemerintah Daerah dalam memberikan pelayan publik sesuai standar pelayanan minimal.
- Merupakan amanat dari Undang-Undang untuk memastikan penyelenggaraan penanggulang bencana dimasukkan ke dalam program pembangunan daerah termasuk pengalokasian dana.
- Merupakan kewajiban Pemerintah Daerah memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kerangka kerja penanggulangan bencana yang diselenggarakan olehnya.

- Bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan perlindungan terhadap kehidupan serta penghidupan yang merupakan tanggungjawab pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.
- Bahwa untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana secara cepat, tanggap, sistematis, terpadu dan terkoordinasi diperlukan suatu lembaga yang secara khusus melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana.

Adapun Wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- Penetapan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan kebijakan pembangunan nasional.
- Penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah.
- Perumusan kebijakan tentang penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana.
- Pembentukan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana.
- Penentuan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan negara lain, badan-badan, atau pihak-pihak internasional lain.
- Pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala nasional. Perumusan kebijakan mencegah penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam untuk melakukan pemulihan. (Riantika, 2021)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serdang Bedagai memiliki tugas sebagai lembaga yang mengurus kebijakan penanggulangan

bencana serta penanganan BPBD melaksanakan fungsi dan tugas lainnya. Adapun tugas utama BPBD adalah sebagai badan pemerintah daerah yang memiliki tugas bidang penanggulangan bencana daerah.

Berdasarkan uraian diatas, maka harus diakui dengan dibentuknya BPBD tidak serta merta penanggulangan bencana dapat berjalan dengan semestinya, aspek penghambat tidak efektifnya suatu kebijakan seperti sarana dan prasarana yang terbatas serta minimnya sumber daya terlatih. Dalam penanggulangan bencana banjir tersebut, kinerja organisasi yakni BPBD Kabupaten Serdang Bedagai koordinator dan lembaga yang berwenang dan bertugas dibidang kebencanaan dituntut agar bekerja dengan optimal.

Dari beberapa cara organizing yang bertujuan untuk mengatur tugas, wewenang dan tanggung jawab setiap individu dalam manajemen. dan program-program kerja yang telah dibuat oleh pemerintah maupun BPBD sendiri, serta untuk mengetahui tindakan apa yang selanjutnya diperlukan oleh pemerintah dalam upaya menanggulangi bencana banjir di Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai. Dilihat dari permasalahan diatas bahwa pengorganisasian yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tersebut belum sepenuhnya berjalan sesuai tujuan yang ingin dicapai.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Fungsi *Organizing* Badan Penanggulanagan Bencana daerah (BPBD) Dalam Mengatasi Bencana banjir Di Kabupaten Serdang Bedagai”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana fungsi Organizing Badan

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam mengatasi bencana banjir di Kabupaten Serdang Bedagai?

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan suatu hal yang akan di capai dalam suatu kegiatan, dan setiap penelitian haruslah memiliki arah dan tujuan yang jelas. Tanpa arah dan tujuan yang jelas, maka penelitian tidak akan berjalan dan tidak mendapatkan hasil yang di harapkan.

Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui lebih dalam tentang fungsi Organizing Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam mengatasi bencana banjir di Kabupaten Serdang Bedagai.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian mengenai Fungsi Organizing Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Serdang Bedagai, antara lain:

- a) Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti tentang bagaimana dalam mengatasi bencana banjir yang dilakukan oleh Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Serdang Bedagai.
- b) Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi pemerintah dan instansi terkait khususnya bagi Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di kabupaten Serdang Bedagai.

- c) Manfaat akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis dan sebagai salah satu yang syarat untuk menempuh ujian sarjana Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini yang akan diuraikan adalah latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

BAB 11 URAIAN TEORITIS

Pada bab ini yang akan diuraikan adalah Organizing (Pengorganisasian), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Bencana banjir yang meliputi pengertian, ciri-ciri, tujuan, dan fungsinya.

BAB 111 METODE PENELITIAN

Pada bab ini yang akan diuraikan adalah jenis penelitian, kerangka konsep, definisi konsep, kategorisasi, narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, lokasi penelitian dan waktu penelitian, deskripsi ringkas objek penelitian.

BAB 1V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini yang akan diuraikan adalah penyajian data dan analisis hasil wawancara.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini yang akan diuraikan adalah simpulan dan saran.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Fungsi

2.1.1 Pengertian Fungsi

Badudu (1996:412) berpendapat bahwa fungsi merupakan kegiatan pokok yang dilakukan dalam suatu organisasi atau lembaga. Dalam kamus umum bahasa indonesia, mengemukakan fungsi adalah jabatan atau kedudukan.

Nining Haslinda Zainal (2008:22) berpendapat bahwa fungsi rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya.

2.2 Fungsi Pengorganisasian (Organizing)

2.2.1 Pengertian Fungsi Pengorganisasian (Organizing)

Fungsi Pengorganisasian (Organizing) Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata pengorganisasian adalah proses, cara, perbuatan untuk mengorganisasi. Pengorganisasian berasal dari kata dasar organisasi. Fungsi organizing dalam manajemen adalah proses mengatur wewenang, tugas, dan tanggung jawab pada setiap individu yang berkaitan dengan perusahaan atau organisasi. Kemudian menjadi satu kesatuan untuk mencapai rencana dan tujuan yang telah diinginkan perusahaan atau organisasi.

Fungsi pengorganisasian (*organizing*) berkaitan erat dengan fungsi perencanaan, karena pengorganisasian pun harus direncanakan. Fungsi yang dijalankan oleh para manajer perusahaan untuk membagi pekerjaan kepada para pelaksana tugas serta mengembangkan struktur hubungan antara pelaksana tugas yang satu dengan yang lainnya sehingga tugas tersebut dapat dilakukan dan menunjang tercapainya tujuan organisasi disebut sebagai fungsi pengorganisasian.

Menurut Drs.M. Manullang, Organisasi dalam arti dinamis (pengorganisasian) adalah suatu proses penetapan dan pembagian pekerjaan yang akan dilakukan, pembatasan tugas-tugas atau tanggung jawab serta wewenang dan penetapan hubungan-hubungan antara unsur-unsur organisasi, sehingga memungkinkan orang-orang dapat bekerja bersama-sama seefektif mungkin untuk pencapaian tujuan. Secara singkat organisasi adalah suatu perbuatan diferensiasi tugas-tugas. Dengan kata lain terlihat bahwa fungsi organisasi menjadi efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Drs. Soekarno K. Organisasi sebagai fungsi manajemen (organisasi dalam pengertian dinamis) adalah organisasi yang memberikan kemungkinan bagi manajemen dapat bergerak dalam batas-batas tertentu.

2.3 Pengorganisasian (Organizing)

2.3.1 Pengertian Pengorganisasian (Organizing)

Pengorganisasian adalah langkah untuk menetapkan, menggolongkan dan mengatur berbagai macam kegiatan, menetapkan tugas tugas pokok, wewenang dan pendelegasian wewenang oleh pimpinan kepada staf dalam

rangka mencapai tujuan organisasi. Berdasarkan defenisi tersebut maka Fungsi pengorganisasian merupakan alat untuk memadukan (sinkronisasi) dan mengatur semua kegiatan yang ada kaitannya dengan personil, finansial, materil dan tata cara untuk mencapai tujuan organisasi yang telah disepakati bersama.(rachma buana, 2014)

Pengorganisasian adalah merupakan fungsi kedua dalam Manajemen dan pengorganisasian didefinisikan sebagai proses kegiatan penyusunan struktur organisasi sesuai dengan tujuan-tujuan, sumber-sumber, dan lingkungannya. Dengan demikian hasil pengorganisasian adalah struktur organisasi. Struktur Organisasi dapat didefinisikan sebagai mekanisme-mekanisme formal organisasi diolah. Struktur organisasi terdiri atas unsur spesialisasi kerja, standarisasi, koordinasi, sentralisasi atau desentralisasi dalam pembuatan keputusan dan ukuran satuan kerja. (Winardi J, 2011)

Malayu Hasibuan (2007: 118-119) berpendapat bahwa Pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut.(Hasibuan, 2007)

Siswanto (2007: 75) berpendapat bahwa Pengorganisasian (organizing) adalah pembagian kerja yang direncanakan untuk diselesaikan oleh anggota kesatuan pekerjaan, penetapan hubungan antar pekerjaan yang efektif

diantara mereka, dan pemberian lingkungan dan fasilitas pekerjaan yang wajar sehingga mereka bekerja secara efisien.

Sondang P.Siagian (2003: 95) berpendapat bahwa pengorganisasian adalah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugastugas, tanggung jawab, dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan yang utuh dan bulat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.(Wahyu, 2018)

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh ketiga ahli di atas, maka kegiatan pengorganisasian dapat diartikan sebagai suatu keseluruhan proses penentuan, pengelompokkan, dan pengaturan serta pendelegasian orang, alat, tugas, serta wewenang dan tanggung jawab sehingga tercipta suatu kesatuan organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan.

2.3.2 Teori-Teori Pengorganisasian (Organizing)

a. Teori fusi (*the fusion theory*)

Teori fusi tentang pengorganisasian menekankan adanya dan bekerjanya suatu proses fusi dalam bidang pengorganisasian.

Menurut penganut teori fungsi, sebuah organisasi berusaha untuk menggunakan individu guna melaksanakan tujuan-tujuannya dan sebaliknya, individu mengharapkan untuk mencapai tujuan-tujuannya sendiri melalui organisasi yang bersangkutan. Titik berat diletakan atas kelakuan, yang sebagian besar berhubungan dengan peran, dan bukanlah pekerjaan modifikasi.

Individu yang bersangkutan misalnya mencari harta, harmoni, kebebasan mengambil keputusan dan prestasi optimum melalui suatu proses

personalisasi. Sebaliknya organisasi yang bersangkutan menimbulkan suatu proses sosialisasi yang ditunjukkan oleh pemberian tugas-tugas dan praktek balas jasa dan hukuman-hukuman. Proses fusi menimbulkan fusi antara proses personalisasi dan proses sosialisasi.

b. Teori Sistem (*the system theory*)

Pada teori sistem pengorganisasian dianggap sebagai suatu sistem variabel-variabel yang saling mempengaruhi satu sama lain.

Bagian-bagian pokok sistem pengorganisasian adalah :

- 1) Individu
- 2) Organisasi formal atau penyusunan fungsi-fungsi
- 3) Organisasi informal
- 4) Pola-pola kelakuan terbalik yang timbul dan syarat-syarat peranan organisasi yang bersangkutan dan persepsi peranan individu
- 5) Lingkungan fisik dimana pekerjaan dilaksanakan

c. Teori kuantitatif (*the quantitative theory*)

Teori kuantitatif memberikan suasana obyektivitas kepada studi tentang pengorganisasian sekalipun ia hanya mencakup suatu bagian dari pada pertimbangan-pertimbangan yang mempengaruhi pekerjaan pengorganisasian. Misalnya kepemimpinan, lingkungan dan komunikasi ditiadakan dalam analisa yang bersangkutan.

Faktor-faktor yang dapat dihitung dipergunakan terhadap faktor-faktor seperti misalnya besarnya kesatuan organisasi, jumlah keputusan-keputusan yang dibuat oleh setiap manajer dan jumlah pekerjaan yang diselesaikan. Sudah dapat dipastikan bahwa model-model matematis akan disempurnakan untuk studi pengorganisasian

2.3.3 Tahapan Pengorganisasian (Organizing)

1. Tahap Kreatifitas

- Orientasi menuju keterampilan operasional dan kewirausahaan
- Organisasi ini berfokus pada produksi dan pemasaran
- Jenis komunikasi non-formal
- Jam kerja yang relatif panjang dengan bonus yang lebih banyak
- Kegiatan organisasi dikelola berdasarkan umpan balik pada kondisi pasar atau reaksi konsumen.

2. Tahap Pengarahan

- Organisasi fungsional memisahkan produksi dan pemasaran
- Penentuan karyawan didasarkan pada spesialisasi
- Pengiriman produksi dan pembelian dikendalikan oleh sistem akuntansi yang baik
- Standar beban kerja, sistem insentif dan persiapan anggaran telah diadopsi
- Komunikasi menjadi semakin formal sesuai dengan hierarki posisi
- Fungsi kepemimpinan mulai memainkan peran pada tahap ini.

3. Tahap Pendelegasian

- Tanggung jawab karyawan meningkat
- Pusat laba dan bonus sebagai sarana meningkatkan motivasi karyawan
- Komunikasi antara atasan dan bawahan semakin langka melalui media surat, surat edaran, buletin atau bentuk komunikasi tertulis, yang semakin banyak digunakan
- Moral karyawan meningkat dengan delegasi

- Promosikan perluasan pasar sehingga karyawan dapat menilai kebutuhan pelanggan dengan lebih baik.

4. Tahap Koordinasi

- Fungsi perencanaan digunakan secara formal dan selalu direvisi
- Kegiatan organisasi produktif
- Staf penelitian dan pengawas dipekerjakan untuk memperkuat kantor pusat
- Biaya dihitung dengan cermat
- Unit operasional akan menjadi pusat pendapatan secara ekonomi. Pemrosesan data biasanya terpusat untuk membuat proses pengambilan keputusan lebih mudah dan lebih cepat. (Puspoprato, Sawaldjo. 2006)

2.3.4 Proses fungsi Pengorganisasian (Organizing)

Fungsi Pengorganisasian dilakukan dalam beberapa fase. Tidak bisa langsung di tunjuk. Berikut adalah proses-proses fungsi pengorganisasian.

- Mangacu pada Rencana dan Tujuan Manajemen

Proses organisasi dalam manajemen dimulai dari rencana dan tujuan. Yang disatukan sebelumnya. Dan jangan lupa bahwa fungsi organisasi ini adalah pelaksanaan rencana dan tujuan yang diinginkan sebelumnya.

- Menentukan Tugas Utama

Rencana dan tujuan telah tercapai. Inilah saatnya mengidentifikasi dan menentukan tugas-tugas utama organisasi. Manajemen memiliki banyak tingkatan dan memiliki subbagian. Perusahaan memiliki manajemen keuangan, manajemen pemasaran, manajemen operasional. Dan manajer sekunder lainnya. Di tingkat lain atau tingkat manajemen.

- Membagi Tugas kepada Individu

Fase ini sangat penting. Eksekutif rencana itu adalah seorang individu. Keberhasilan Anda ditentukan oleh orang yang mengelolanya. Kesalahan identifikasi orang Risiko kebangkrutan lebih besar. Anda harus berhati-hati di bagian ini.

- Mengalokasikan Sumber Daya

Tugas sudah ditentukan, orangnya juga sudah di tunjuk. Sekarang adalah waktu untuk mengalokasikan sumber daya perusahaan. Untuk dimanfaatkan, digunakan, dan menawarkan manfaat semaksimal mungkin.

- Evaluasi Strategi Pengorganisasian

Evaluasi adalah langkah terakhir. Akankah strategi organisasi berjalan sesuai rencana? Apakah ada penyimpangan? Apakah ada perubahan? Atau apakah strategi organisasi dikembangkan langsung pada penyebab masalah?(Wijaya, 2016)

2.3.5 Prosedur dalam proses Pengorganisasian (Organizing)

- .Rincian semua pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi.
- Pembagian total beban kerja menjadi kegiatan yang secara logis dapat dilakukan oleh satu orang. Pembagian kerja seharusnya tidak terlalu sulit untuk tidak diselesaikan atau terlalu mudah untuk menyisakan waktu untuk pengangguran, tidak efisien dan biaya yang tidak perlu.
- Akuisisi dan pengembangan mekanisme untuk mengoordinasikan pekerjaan anggota organisasi dalam unit yang terintegrasi dan harmonis. Mekanisme koordinasi ini akan mengingatkan anggota organisasi tentang tujuan organisasi dan mengurangi ketidakefisienan dan konflik destruktif.

2.3.6 Manfaat fungsi Pengorganisasian (Organizing)

Fungsi organisasi harus dilakukan karena banyak Manfaatnya. Berikut adalah manfaat dari fungsi Pengorganisasian:

- Fasilitasi koordinasi antara para pihak dalam kelompok
- Pembagian tugas sesuai dengan kondisi perusahaan saat ini
- Semua orang tahu apa yang sedang dilakukan
- Sederhanakan pemantauan
- Maksimalkan manfaat spesialisasi
- Efisiensi biaya
- Hubungan antar individu menjadi lebih harmonis.(Wijaya, 2016)

2.3.7 Pengorganisasian sebagai Salah satu Fungsi Manajemen

Kita tentu perlu mempelajari fungsi manajemen lainnya. Salah satu fungsi manajemen adalah untuk mengetahui bahwa organisasi adalah salah satu fungsi manajemen yang paling penting, karena pengorganisasian berarti bahwa semua sumber daya yang tersedia dalam organisasi diintegrasikan dalam bentuk sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan.

Pentingnya organisasi sebagai fungsi yang dilakukan oleh setiap manajer atau orang yang mengelolanya di setiap organisasi. Untuk membuat organisasi ketika mereka mencapai tujuan mereka. Memahami organisasi sebagai salah satu fungsi manajemen akan mengklarifikasi bahwa proses pengaturan dalam organisasi tidak akan selesai tanpa implementasi dalam bentuk orientasi terhadap orang-orang dalam organisasi sehingga dapat terus melakukan kegiatan sesuai dengan tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya.

2.3.8 Ciri-ciri Organisasi

Handyaningrat (1981:43), adapun ciri-ciri organisasi antara lain sebagai berikut:

- Adanya kewenangan, koordinasi dan pengawasan
- Tiap-tiap anggota memberikan sumbangan usahanya ataupun tenaganya
- Adanya suatu kelompok orang yang dapat dikenal
- Adanya kegiatan yang berbeda-beda tapi mempunyai hubungan yang saling berkaitan
- Adanya suatu tujuan.

2.3.9 Unsur dalam pengorganisasian (Organizing)

Agar suatu organisasi berjalan dengan baik, maka dibutuhkan unsur penting di dalamnya. Berikut ini adalah unsur-unsur organisasi menurut Wursanto (2003:54) yaitu:

- Man (orang-orang), dalam suatu organisasi sering disebut dengan istilah pegawai atau personil.
- Kerja sama, merupakan suatu perbuatan dalam hal bantu membantu atau suatu perbuatan yang dilakukan secara bersamasama untuk mencapai tujuan bersama.
- Tujuan bersama, merupakan suatu arah atau sasaran yang ingin dicapai dan menggambarkan apa yang ingin dicapai melalui program, pola (network), kebijaksanaan (policy), prosedur, anggaran, strategi, dan peraturan-peraturan (regulation) yang sebelumnya telah ditetapkan.

- Peralatan (equipment), terdiri dari semua sarana yang berupa materi, uang, mesin- mesin, dan barang modal lainnya (gedung/ tanah/bangunan/kantor).
- Lingkungan (environment)
- Kekayaan alam.
- Kerangka atau konstruksi mental organisasi, berupa prinsip-prinsip organisasi.

2.3.10 Prinsip-prinsip perorganisasian (Organizng)

Sebagaimana dikutip oleh Huse dan Bowditch (1977), Fayol mengemukakan 14 prinsip organisasi yaitu:

- a. Pembagian kerja (division of work)
- b. Wewenang dan tanggungjawab (authority and responsibility)
- c. Kesatuan perintah (unity of command)
- d. Disiplin (discipline)
- e. Kesatuan arah (unity of direction)
- f. Kepentingan yang bersifat individu dibawah kepentingan umum
(subordination of individual interest to general interest)
- g. Gaji pegawai (remuneration of personel)
- h. Sentralisasi (centralization)
- i. Saluran jenjang (scalar chain)
- j. Ketertiban (order)
- k. Keadilan (equity)
- l. Kestabilan masa kerja pegawai (stability of tenure of personnel)
- m. Inisiatif (initiative)
- n. Kesatuan jiwa korps (esprit de corp).

2.4 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

2.4.1 Pengertian Badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan lembaga pemerintah non departemen yang melakukan tugas penanggulangan bencana di daerah baik Kabupaten/Kota maupun Provinsi dengan berdasar pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi Nasional. Badan ini menyelenggarakan penanggulangan bencana yang bertujuan untuk menjamin diadakannya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terpadu, terkoordinasi, terencana, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari resiko, ancaman, dan dampak bencana. Dalam pelaksanaannya, BPBD bertanggung jawab penuh kepada Gubernur. Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri dari tahap prabencana, bencana, dan pasca bencana.

Bencana menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah rangkaian peristiwa atau peristiwa yang mengganggu dan mengancam penghidupan dan kehidupan masyarakat yang ditimbulkan oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, dan dampak psikologis. Definisi bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana merupakan pertemuan dari tiga unsur, yaitu kerentanan, ancaman bencana, dan kemampuan yang di picu oleh suatu kejadian.

Pada buku Nani Nurachman (dalam Gunawan, 2017), bencana merupakan kejadian yang luar biasa, diluar kemampuan normal seseorang untuk menghadapinya, mengancam keselamatan jiwa dan juga menakutkan.

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, penanggulangan bencana memiliki tujuan yaitu:

- Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada.
- Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana.
- Mendorong semangat gotong royong, kesetia kawan dan kedermawanan.
- Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.
- Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- Menghargai budaya lokal. Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta.

1.4.2 Tugas pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundangundangan;
3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;

7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2014:2), Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.

Menurut Darmadi (2013:153), Metode penelitian adalah salah satu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

3.1 Jenis Penelitian

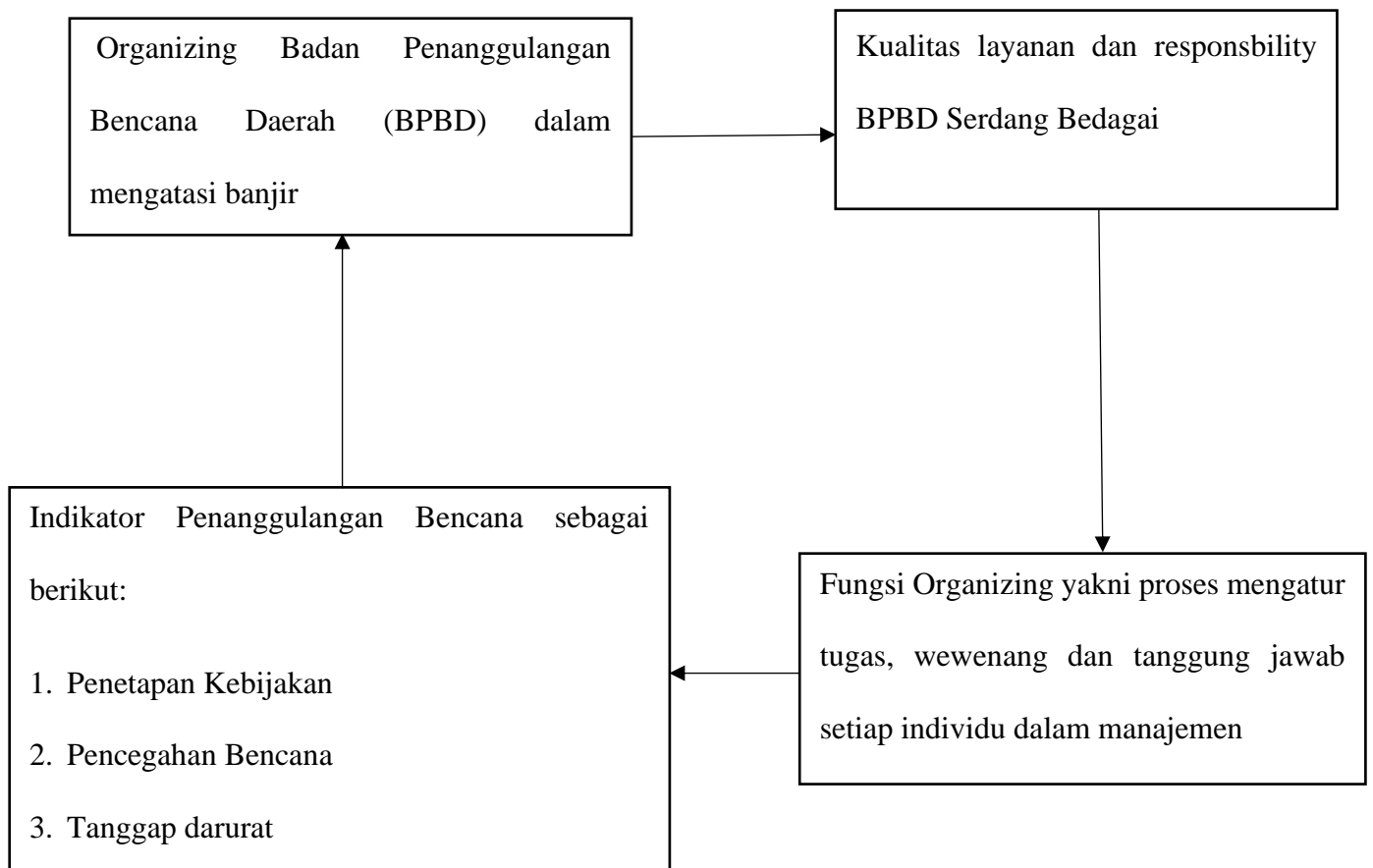
Adapun jenis penelitian yang akan digunakan di dalam penulisan ini adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Menurut Sugiyono (2018:7-9) Metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang didasarkan pada filosofi postpositivisme digunakan untuk memeriksa kondisi benda-benda alam (sebagai lawan dari adalah eksperimen) dimana peneliti adalah instrumen kunci dari teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data sifatnya induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif yang lebih menekankan pada makna daripada generalisasi.

Menurut Arikunto (2010:13) metode deskriptif kualitatif adalah untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian yang dilakukan. Tujuan dari deskriptif kualitatif yaitu membuat penjelasan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam arti ini, pada penelitian deskriptif tidak diperlukan mencari atau menerangkan saling hubungan antar koporasi, sehingga juga tidak memerlukan hipotesis.

3.2 Kerangka Konsep

Gambar 3.1
Kerangka Konsep



3.3 Definisi konsep

Menurut Gusniwati (2015:30) pemahaman konsep adalah sesuatu kemampuan untuk menemukan ide-ide abstrak untuk mengklasifikasikan bendabenda yang ada dinyatakan dalam suatu istilah kemudian dituangkan ke dalam suatu contoh, sehingga seseorang dapat memahami suatu konsep dengan jelas.

Adapun konsep pemikiran yang digunakan pada peneliti dalam mempersempit perhatian yang akan diteliti yaitu :

- a. Fungsi adalah kegiatan pokok yang dilakukan dalam suatu organisasi atau lembaga. Dalam kamus umum bahasa indonesia, mengemukakan fungsi adalah jabatan atau kedudukan.
- b. Organizing (Pengorganisasian) adalah langkah untuk menetapkan, menggolongkan dan mengatur berbagai macam kegiatan, menetapkan tugastugas pokok, wewenang dan pendelegasian wewenang oleh pimpinan kepada staf dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Berdasarkan defenisi tersebut maka Fungsi pengorganisasian merupakan alat untuk memadukan (sinkronisasi) dan mengatur semua kegiatan yang ada kaitannya dengan personil, finansial, materil dan tata cara untuk mencapai tujuan organisasi yang telah disepakati bersama.
- c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan lembaga pemerintah non departemen yang melakukan tugas penanggulangan bencana di daerah baik Kabupaten/Kota maupun Provinsi dengan berdasar

pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi Nasional. Badan ini menyelenggarakan penanggulangan bencana yang bertujuan untuk menjamin diadakannya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terpadu, terkoordinasi, terencana, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari resiko, ancaman, dan dampak bencana. Dalam pelaksanaannya, BPBD bertanggung jawab penuh kepada Gubernur.

3.4 Kategorisasi penelitian

Kategorisasi merupakan bagaimana cara mengukur untuk suatu variable penelitian sehingga dapat diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian sebagai pendukung untuk menganalisa variable tersebut.

Adapun kategorisasi dari Fungsi Organizing Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam mengatasi bencana banjir di Kabupaten serdang Bedagai, yaitu:

- Adanya perencanaan kegiatan penanggulangan bencana dan menyiapkan program kegiatan.
- Adanya strategi pencapaian tujuan
- Adanya pengarahan
- Adanya kerjasama

3.5 Informan

Informan adalah

- Nama : Sukma Permana, SE,M.Si

- Umur : 37 tahun
- Perkerjaan/Jabatan : Sektretaris
- Nama : Marnangkok Gultom,SP ,M.Si
- Umur : 43 tahun
- Pekerjaan/Jabatan : Kabid Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
- Nama : Khairunnisa
- Umur : 22 tahun
- Pekerjaan/Status : Akademisi

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Dalam Penelitian ini, data primer dikumpulkan dengan menggunakan beberapa metode.

- Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan pengumpulan data dengan teknik wawancara. Wawancara adalah alat yang digunakan dalam komunikasi yang berbentuk sejumlah pertanyaan lisan yang diajukan oleh pengumpul data sebagai pencari informan yang dijawab secara lisan oleh informan. Dengan kata lain, wawancara secara sederhana merupakan alat pengumpul data berupa tanya jawab antara pihak pencari informasi dengan sumber informasi yang berlangsung secara lisan.

- Data sekunder merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik. Dokumen yang telah diperoleh kemudian dianalisis (diurai), dibandingkan dan dipadukan membentuk suatu hasil kajian yang sistematis, padu dan utuh. Data sekunder adalah data pendukung atau tambahan tetapi tidak dapat diabaikan karena sumber ini dapat melengkapi penelitian sehingga informasi menjadi lebih jelas.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif, yaitu data yang didapatkan melalui pengumpulan data kemudian diinterpretasikan sepadan dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan. Setelah itu data yang telah diperoleh dari hasil wawancara akan diuraikan secara deskriptif dengan analisis kualitatif

Menurut Sugiyono (2016) analisis data adalah proses penyusunan secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori menjabarkan ke dalam unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain maupun orang lain.

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan elemen utama dalam analisis yang merupakan proses seleksi, penyederhanaan, memfokuskan dan abstraksi data, proses ini berjalan selama penelitian.

2. Penyajian data

Penyajian data merupakan suatu kumpulan sistem informasi deskripsi dalam bentuk tuturan yang memungkinkan dapat dilakukan simpulan penelitian. Kajian ini merupakan susunan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan simpulan yang wajib di validasi agar cukup kuat dan dapat di pertanggungjawabkan, maka perlu dilakukan tindakan pengulangan yang bertujuan untuk penguatan penelusuran data

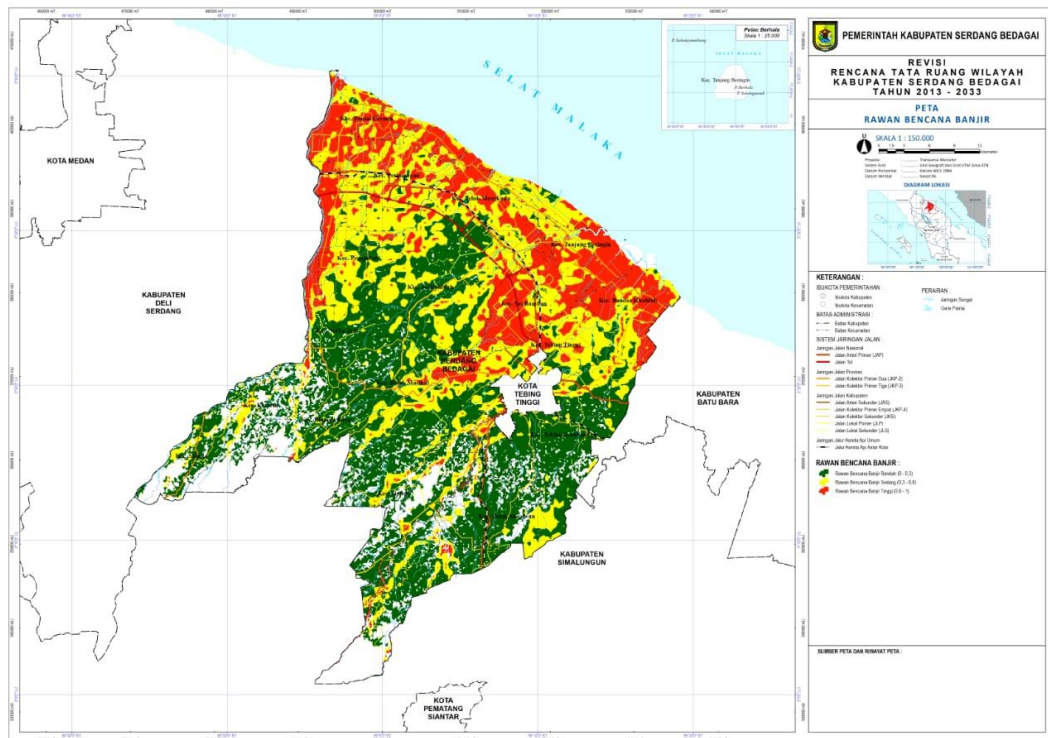
3.8 Waktu dan lokasi penelitian

Waktu penelitian yang di gunakan peneliti untuk pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal keluarnya ijin penelitian 5 Juli sampai dengan 15 Agustus 2023. 1 (satu) bulan pengumpulan data dan 1 bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung. Lokasi penelitian ini adalah Kantor BPBD di Jalan Medan-Tebing Tinggi, Firdaus, Kec. Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai Sumatra Utara.

3.9. Deskripsi Ringkas Objek Penelitian

Gambar 3.2

Peta rawan banjir Kab Serdang Bedagai



a. Informasi BPBD Serdang Bedagai

Secara geografis Kabupaten Serdang Bedagai terletak pada posisi $03^{\circ}01'2.5''$ LU – $03^{\circ}46'33''$ LU dan $98^{\circ}44'22''$ BT – $99^{\circ}19'01''$ BT dengan luas wilayah $1.900,22 \text{ Km}^2$ dan garis pantai sepanjang 95 Km dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Simalungun;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Asahan Dan Batubara;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Ular – Kabupaten Deli Serdang.

Kawasan Serdang Bedagai terdiri dari 17 (tujuh belas) Kecamatan dan sebagian besar berada di kawasan pesisir pantai yang langsung berbatasan dengan Selat Malaka dengan panjang pantai kurang lebih 95 Km yang terbentang

dari Barat sampai ke Timur, terdiri dari 6 (enam) Kecamatan yaitu Pantai Cermin, Perbaungan, Teluk Mengkudu, Tanjung Beringin dan Bandar Khalifah.

Di Kabupaten Serdang Bedagai, semua sungai pada umumnya telah memiliki tanggul. Namun, tanggul-tanggul tersebut sebagian telah mengalami kerusakan akibat kikisan air sungai sehingga perlu perbaikan dan normalisasi. Apakah curah hujan cukup tinggi, tanggul-tanggul tersebut tidak mampu menampung debit air yang cukup besar dan berakibat jebolnya tanggul dan akhirnya menjadi bencana banjir.

b. Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Serdang Bedagai

Adapun visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serdang Bedagai adalah sebagai berikut:

1. Visi :

Terwujudnya Kabupaten Serdang Bedagai yang siaga dan kesatria dalam menghadapi bencana.

2. Misi

- Membangun budaya pengurangan resiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;
- Menyelenggarakan dukungan logistik dalam penanggulangan bencana;
- Menyelenggarakan pemulihan wilayah dan masyarakat pasca-bencana;

c. Tujuan dan Sasaran organisasi

Adapun yang menjadi tujuan dan sasaran organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serdang Bedagai antara lain sebagai berikut:

- a. Penguatan kerangka regulasi penanggulangan bencana melalui penyusunan peraturan, prosedur-prosedur tetap dan rencana-rencana penanggulangan bencana yang jelas dan terarah sehingga dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- b. Memadukan program pengurangan bencana dalam rencana pembangunan daerah, sehingga program dan kegiatan penanggulangan bencana tidak berdiri sendiri tetapi terpadu dengan program reguler;
- c. Penanggulangan bencana berbasis masyarakat yang dilakukan dengan melibatkan masyarakat dengan melakukan himbauan, penyuluhan, sosialisasi dan aplikasi penanggulangan bencana;
- d. Mengupayakan peningkatan peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan organisasi mitra Pemerintah untuk mendorong upaya kesiapsiagaan dan upaya pengurangan resiko di tingkat masyarakat;
- e. Meningkatkan peran dunia usaha dimana kalangan dunia usaha diharapkan dapat berkontribusi dalam penggalangan dan mendorong relawan berpartisipasi dalam penanggulangan bencana, termasuk dalam penyelenggaraan pelatihan-pelatihan dan peningkatan kapasitas relawan.

Gambar 3.2

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pada bab ini membahas dan menyajikan data yang telah didapat dari hasil penelitian lapangan, penelitian ini dilakukan lapangan langsung dan telah memperoleh data mengenai pendapat responden. Dalam bab ini akan dibahas data yang diperoleh selama penelitian berlangsung di Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam mengatasi bencana banjir. Pada kesempatan ini, penulis berusaha untuk mengulas objek yang diteliti dan menganalisis data-data yang diperoleh.

Bab ini menyajikan dan menganalisis data yang telah didapat dari hasil penelitian lapangan atau yang dikenal dengan pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan wawancara atau tanya jawab dengan narasumber yang kemudian dianalisis agar dapat diperoleh kesimpulan.

Wawancara dilakukan guna memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang peneliti tentukan serta untuk memperoleh data-data yang mendukung dalam penelitian ini. Data-data tersebut berupa pernyataan dari para informan mengenai permasalahan penelitian skripsi ini. Pengumpulan data dilakukan mulai dari 5 Juli sampai 15 Agustus 2023.

4.1.1 Adanya Perencanaan kegiatan penanggulangan bencana dan menyiapkan program kegiatan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu 2 Agustus 2023 Pukul 10:30 WIB dengan Bapak Sukma Permana, SE, M.Si sebagai

sekretaris beliau mengatakan bahwa “perencanaan yang dilaksanakan banyak ada proses perencanaan, contohnya koordinasi dengan BMKG itu rutin dilaksanakan disetiap bulannya kemudian ada koordinasi dengan instansi-instansi terkait yang bekerja sama dengan kita pada masalah-masalah kebencanaan ada PUPR dalam segi fisik Perkim, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial. Adapun kendala yang dihadapi yaitu keterbatasan tupoksi di BPBD karena BPBD tidak bisa menganggarkan untuk kepentingan-kepentingan fisik dan lain lain. Cara mengatasi kendala itu kita lakukan koordinasikan dengan PUPR kemudian menggambarkan dimana saja yang rawan banjir direkomendasikan untuk baik itu pendalaman parit atau sosialisasi mengenai sungai dan lain-lain.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu 7 Juli 2023 Pukul 10:30 WIB dengan Bapak Marnangkok Gultom,SP,M.Si sebagai Kepala Bidang Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi korban Bencana beliau mengatakan bahwa : “ Segala sesuatu emang sudah diatur dengan regulasi dimana setiap permasalahan atau apapun yang menyangkut bencana itu sebetulnya semua dasarnya sudah ada di BNPB. Namun terkadang ketika sudah dilapangan atau didaerah tidak bisa persis dilaksanakan seperti itu karena berbagai hal ada kendala atau keterbatasan lainnya. BPBD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan undang-undang no 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana yang berisi tentang langkah-langkah yang harus dilaksanakan dalam mengatasi segala semua jenis bencana yang terjadi di suatu daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab Serdang Bedagai menjadi salah satu OPD di Pemerintahan Kab Serdang Bedagai pada awalnya

melaksanakan kajian untuk menyusun dokumen KRB tepat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Langkah tersebut tersusun dalam dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) dan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) wilayah administrasi kabupaten dan kota. Dokumen KRB memberikan informasi terkait dengan bahaya, Kerentanan, dan kapasitas serta potensi dampak kerugian akibat bencana. Masing-masing daerah memiliki karakteristik ancaman bencana yang berbeda-beda.

Dokumen KRB dibutuhkan para pengambil kebijakan di setiap wilayah administrasi untuk mengetahui dan memahami dengan baik risiko bencana di daerah. Dengan diketahui risiko bencana, pemerintah daerah dapat melanjutkan untuk menyiapkan strategi berupa dibuatkan perencanaan, yaitu Rencana Penanggulangan Bencana (RPB). Sementara itu, RPB berisi tentang program dan kegiatan yang perlu dilakukan oleh daerah pada setiap tahapan bencana. dokumen tersebut harus diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) agar perencanaan pembangunan di daerah dapat melihat wilayah-wilayah yang memiliki risiko tinggi dapat dicegah dan mitigasi.

Sudah menjadi tradisi disetiap tahun bahwa ada 5 kecamatan yang selalu mengalami banjir khususnya Kecamatan Sei Rampah, Tanjung Beringin, Sipispis, Tebing Tinggi, Bandar Khalifah, Perbaungan dan Teluk Mengkudu termasuk daerah yang selalu mengalami bencana banjir. Hampir setiap periode bisa dipastikan saat cuaca musim hujan ditambah dengan pasang air laut yang semakin memicu terjadinya banjir di Kabupaten Serdang Bedagai kemudian karakteristik wilayah di Serdang Bedagai bahwa daerah pesisir yang berbatasan langsung dengan laut kemudian dialiri oleh banyak

sungai termasuk ada 3 sungai yang cukup besar yaitu sungai ular, sungai padang, dan sungai bedagai ini yang mengakibatkan hampir setiap tahun mengalami bencana banjir.

Dokumen KRB ini kita ketahui lokasi yang potensial akan mengalami banjir kemudian setelah dokumen KRB ini terbentuk kemudian di susun dokumen yang ke 2 yaitu RPB atau rencana penanggulangan bencana setelah diketahui lokasinya suatu bencana akan terjadi disusun lah dokumen RPB artinya sudah merupakan sebuah rencana penanggulangan bencana diketahui kemudian setelah lokasi diketahui baru disusun rencana pengendalian nya , rencana pengendalian ini sudah beroprasional tapi belum tekhnis artinya RPB ini diketahui lah kemampuan sebuah suatu daerah untuk mengatasi bencana kemudian apa potensi yang ada disuatu daerah untuk mengatasi bencana misalnya sumber daya manusia, personil untuk mengatasi bencana kemudian peralatan-peralatan kemudian logistik yang tersedia di suatu daerah tersebut.

Kemudian dokumen ke 3 sudah tercantum semua sudah hampir oprasional ini yang dinamakan renkon atau rencana kontingensi lalu begitu bencana terjadi tinggal mengaktifkan renkon artinya bencana itu sudah termasuk skala besar kemudian sudah mengancam kehidupan dan penghidupan masyarakat artinya sudah menimbulkan korban nyawa, menimbulkan kerugian harta benda merusak lahan pertanian dan kerugian lainnya. Ketika skala sudah tiba lalu diterbitkan namanya SK DARURAT BENCANA begitu bencana artinya bukan semata mata begitu ada bencana langsung kita terbitkan SK DARURAT harus dikaji terlebih dahulu ke lapangan sudah layak atau belum.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa, 15 Agustus 2023 dengan Khairunnisa selaku mahasiswi. Tentang bagaimana keterlibatan masyarakat yang terkena musibah banjir, beliau mengatakan “ bahwa perencanaan yang dilakukan badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) sudah terlaksana, karena di beberapa kecamatan sudah ada parit untuk menampung curah hujan tersebut. Walaupun masih ada di beberapa desa yang belum ada paritnya”.

4.1.2 Adanya Strategi Pengumpulan Data dan Informasi tentang kondisi wilayah, Potensi Bencana serta kebutuhan masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu 2 Agustus 2023 Pukul 10:30 WIB dengan Bapak Sukma Permana, SE, M.Si beliau mengatakan bahwa “ Strategi yang dilaksanakan untuk pengatasan penanggulangan bencana daerah, bahwa kita rutin melakukan simulasi terhadap satgas dan staff yang ada di BPBD untuk persiapan mengatasi bencana yaitu puting beliung ada longsor dan banjir.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) juga sudah membentuk 4 destana (desa tangguh bencana) yang disosialisasikan ke masyarakat tentang kondisi-kondisi bagaimana mengantisipasi dan bagaimana menghadapi banjir untuk masyarakat. Kita juga melakukan cek rutin peralatan-peralatan yang hampir setiap terjadi bencana peralatan itu tersedia baik tenda yang sudah tidak pakai. Kita punya satgas, trc dikoordinasikan dengan baik itu rapat-rapat kecil terhadap satgas ataupun kepada satgas-satgas lainnya. Adapun kendala yang dihadapi kurangnya kesadaran masyarakat sebenarnya terhadap menjaga lingkungan kemudian masih kurangnya sdm yang mumpuni yang bersertifikat kebencanaan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu 7 Juli 2023 Pukul 10:30 WIB dengan Bapak Marnangkok Gultom,SP,M.Si sebagai Kepala Bidang Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi korban Bencana beliau mengatakan bahwa : “Penguatan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) harus benar-benar berfungsi sebagai kordinator, kelembagaan kuat dalam hal ini mampu menggerakkan instansi lain sehingga terjadinya bencana pasti bukan hanya 1 pihak yang terlibat tujuannya agar rencana penanggulangan bisa berjalan dengan efektif.

fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai sebagai kordinator mampu mengorganisir OPD” lain ataupun instansi lain khususnya untuk menanggulangi bencana banjir tersebut. Penguatan kelembagaan ini juga tidak hanya datang atau hanya bicara omong ksoong tetapi juga harus didukung dengan jumlah anggaran, kemudian peningkatan sumber daya manusi (SDM) memang belakangan ini sudah mulai berjalan dengan mengirim personil-personil untuk mengikuti pelatihan yang dilaksanakannya.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dipusat maupun Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) di Provinsi Sumatra Utara, jadi penguatan kelembagaan itu yang pertama dan didukung dengan anggaran artinya anggaran ini sangat penting contoh kenapa saya lemparkan lagi ke anggaran penanggulangan bencana itu sangat membutuhkan yg namanya peralatan, logistik, peralatan itu bermacam macam peralatan bergerak kendaraan kemudian peralatan statis semacam tenda untuk pengungsi kemudian juga yang ke2 adalah logistik artinya akan distrusikan ke titik-titik pengungsian pada tenda yang didirikan walaupun itu saja tidak bisa kita

penuhi apakah mungkin BPBD kuat lembaga nya karena warga negara berhak mendapat perlindungan dan pelayanan pada saat terjadi nya bencana tapi itu balik seperti tadi lagi kita lihat dulu skala bencana nya kalau memang bencana nya belum mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat nya mungkin kita hanya bisa memberikan bantuan secukupnya berupa sembako atau hal lain yang dibutuhkan tapi kalau sudah harus membutuhkan pengungsian tentunya upaya yang kita laksanakan harus sudah harus semakin besar begitu masyarakat sudah harus mengungsi.

Kepala pelaksana dalam hal ini sebagai pimpinan tertinggi setiap hari memberikan arahan bimbingan kepada anggota. Pada saat bencana tiba setiap minggu Kepala Pelaksana selalu memberi arahan biasanya dihari rabu rapat mingguan selalu diberi arahan tetapi begitu terjadi potensi ancaman bencana banjir itu pertemuan ini makin kita insentifkan. Kemudian begitu siaga darurat ini kita aktifkan itu semua personil sudah harus siaga di kantor atau di posko kemudian secara rutin juga ada personil yang diarahkan untuk memantau kondisi sungai.

kemudian apabila bencana itu dinaikkan statusnya menjadi tanggap darurat ini artinya semua pegawai atau kelompok jabatan fungsional dan pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sudah siaga. Dalam masa siaga masih mungkin bidang 1 dan bidang 2 yang siaga, bidang 1 yaitu Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dan Bidang 2 yaitu Bidang Kedaruratan dan Logistik, bidang 3 Rehabilitasi dan Rekonstruksi. yaitu penanganan pasca bencana dan suatu surat keputusan oleh bupati yang diterbitkan yaitu SK KOMANDO setiap surat keputusan bupati tentang

tanggap begitu SK KOMANDO aktif artinya pihak-pihak dari luar sudah terlibat semua dari TNI POLRI dari DINAS LAIN sudah terlibat semua. Banjir di Serdang Bedagai pada umumnya banjir kiriman dari daerah hulu sungai dari simalungun kemudiam ditambah dengan air hujan yg turun dan biasanya diperparah dengan terjadinya pasang air laut dan pasangnyanya air laut adalah Karakteristik banjir di Serdang Bedagai.

Banjir yang terjadi disetiap tahunnya tidak merusak insfratraktur tetapi menimbulkan genangan yg cukup lama seperti di Sei Rampah bisa sampai 1 bulan penuh tergenang air begitu juga di tanjung beringin, tahun lalu agak istimewa selama 2 bulan terjadi genangan yang cukup lama dari oktober sampai november lalu november ke desember kalau tahun sebelumnya itu hanya sekali. karakteristik banjir di sergei berupa genangan artinya menggenangi pemukiman , jalan otomatis mengganggu lalu lintas dan mengganggu aktifitas perekonomian masyarakat yang jelas, nelayan pun tidak bisa turun kelaut dan hujan nya tidak merusak insfratraktur seperti bangunan patah jalan hancur lebur.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari rabu, 15 Agustus 2023 dengan Khairunnisa selaku mahasiswi. Tentang bagaimana keterlibatan masyarakat yang terkena bencana banjir, beliau mengatakan “ menurut saya bentuk pengumpulan data sudah yang dilakukan pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sudah sesuai prosedur atau arahan yg diberikan kepala pelaksana. Dengan terkumpulnya data membuat masyarakat merasa dipedulikan oleh pemerintah”.

4.1.3 Adanya Pengarahan Simulasi dan Latihan Penanggulangan Bencana secara berkala

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari rabu 2 Agustus 2023 pukul 10.00 WIB dengan Bapak Sukma Permana,S.E,M.Si sebagai sekretaris beliau mengatakan “ adapun bentuk pengarahannya yang diberikan kepala pelaksana kepada staff pegawai biasanya bersifat teknis, secara teoritis diberikan pengarahannya tetapi lebih sering melakukan simulasi-simulasi mendirikan tenda kemudian simulasi cara memasak karena kita punya fasilitas/dapur umum yang bisa dijalankan di bencana. Adapun kendala yang dihadapi adalah kurangnya fasilitas, masih kurang tenaga ahli untuk memberikan kemampuan yang bisa ditunjukkan, contoh masih kurangnya tenaga yang bisa melakukan penyelamatan di dalam air”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu 7 Juli 2023 Pukul 10:30 WIB dengan Bapak Marnangkok Gultom, SP,M.Si sebagai Kepala Bidang Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi korban Bencana beliau mengatakan bahwa : Ketika bencana banjir terjadi setiap pagi selalu diadakan briefing sebelum melaksanakan langkah” apa yg akan diambil pagi hari sampai sore terkadang juga langkah ini tidak selalu sempurna seperti apa yg direncanakan karena kondisi dilapangan bisa berubah-ubah misalnya kita ingin drop logistik ternyata dilapangan belum selesai dalam pelaksanaan penanggulangan pegawai tidak bekerja sendiri, mereka dibantu oleh pihak kecamatan dan aparat desa salah satu kendala contoh dlm mendistribusikan logistik ini menimbulkan hal yang tidak seharusnya terjadi dan perlu hati-hati dalam pendistribusian logistik.

Kepala Pelaksana membagi timnya setiap hari itu ada yg mengawas untuk di posko tugasnya mencatat atau menerima informasi-informasi dari masyarakat daerah mana saja yg mulai terdampak pada hari ini. Petugas di posko yang mencatat atau mendata lalu Kepala Desa yang melaporkan atau memberi data ke pihak penjaga posko berapa jumlah Kartu keluarga yang terdampak, berapa jiwa yang terdampak bencana.

Begitu terjadi banjir di 5 kecamatan bagaimana kami mendata yg terdampak berapa rumah yg tergenang berapa jiwanya, jadi kita memang sangat bergantung oleh bantuan dari perangkat desa dan kecamatan kemudian ada tim yg standby di posko untuk menampung formasi-formasi dari desa kemudian ada team yg akan mengurus perlengkapan dan peralatan apakah di suatu tempat itu sudah harus mengungsi lalu tim BPBD yg akan memasang tenda dan lainnya kemudian apakah dibutuhkan perahu untuk evakuasi atau alat mobilisasi warga keluar masuk dari rumahnya ke jalan, dan itu sangat membutuhkan perahu, kemudian ada tim lain untuk melihat atau mendroping bantuan logistik.

Bantuan logistik ini sebetulnya BPBD hanya bertanggung jawab memenuhi kebutuhan logistik di tenda pengungsian. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tugas pokoknya memang mengurus warga yang di pengungsian ini bagaimana dengan warga” lain yg tidak mengungsi itu lebih dominan tugasnya ke dinas sosial itupun ada paket bantuan logistik untuk korban bencana contoh misalnya 1 desa terendam 100 rumah dari 100 rumah ini yang mengungsi hanya 10 rumah BPBD fokusnya di 10 KK yang mengungsi atau ditempat lain kalau emang ada tempat pengungsi tanpa tenda tapi itu tetap dinamakan titik pengungsian juga.

kemudian juga ada team yang ditugaskan untuk pencatatan data kemudian ada juga humas biasanya kalau sudah bencana itu terjadi wartawan itu ngulik-ngulik atau minta data biasanya ada kita tugaskan juga untuk melayani data itu yang dipertanyakan oleh pers supaya 1 data dan tidak terjadi simpang siur dan dasar kita biasanya dasar untuk mensharing data itu surat dari desa supaya valid karna kita tidak mampu mendata langsung ke lapangan dengan jumlah personal seperti ini dengan lokasi yang sangat luas.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari selasa 15 Agustus 2023 dengan Khairunnisa selaku mahasiswi, tentang bagaimana keterlibatan masyarakat yang terkena bencana banjir. Beliau mengatakan “menurut saya dengan adanya pengarahan dari BPBD ini sangat membantu dan banyak manfaat yang didapatkan masyarakat. Manfaat yang didapatkan masyarakat dari pengarahan tersebut hingga sekarang sangat jarang terjadinya banjir yang disebabkan penyumbatan saluran air”.

4.1.4 Adanya kerjasama pengembangan sistem informasi bencana sebagai alat mempercepat proses pengumpulan data dan informasi

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari rabu, 2 Agustus 2023 pukul 10.00 WIB dengan Bapak Sukma Permana,S.E,M.Si sebagai Sekretaris beliau mengatakan “ bentuk kerja sama yang dilakukan kita sudah berupaya dengan melakukan interkoneksi HT kepada anggota dan lain-lain. Kemudian bentuk kerjasama yaitu sudah koneksi untuk ke BMKG terkait program inarisk. Kemudian adapun kendala yang dihadapi adalah fasilitas yang kita punya belum semua, maksudnya adalah belum bisa mempunyai sebagai personal jadi lebih ditunjuk ketua kelompok dan itulah yang bisa untuk dihubungi karena fasilitasnya belum cukup untuk semua anggota.

Adapun kerjasama seperti Whatsapp Grub (WAG) untuk sementara ini karena itu yang lebih mudah namun itupun masih terjadi kelemahan karena itu skala nya masih kemudian terjadi pemutusan jaringan karena Whatsapp punya berbagai jaringan provider”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu 7 Juli 2023 Pukul 10:30 WIB dengan Bapak Marnangkok Gultom,SP,M.Si sebagai Kepala Bidang Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi korban Bencana beliau mengatakan bahwa : “Bentuk kerjasama nya antara atasan dan bawahan, atasan memberi pengarahan membagikan tugas anggota menjalankan, kerjasama.

Dalam hal ini bukan dalam arti sempit kerjanya sama tidak artinya setiap personil itu sudah harus tau pekerjaannya masing” kerjasama yg baik itu adalah apabila setiap personil atau bawahannya itu setiap individu dalam organisasi ini harus tahu apa tugas dan fungsinya masing” apa yg harus dikerjakan atau tugas dari pimpinan itu adalah untuk mengarahkan atau memberikan petunjuk bagaimana supaya anggota atau bawahan itu bisa melaksanakan tugasnya dengan baik kemudian apabila ada kendala itu disampaikan ke pimpinan untuk diberikan arahan bagaimana mengatasi kendala-kendala tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu, 15 Agustus 2023 dengan Khairunnisa selaku mahasiswi, tentang bagaimana keterlibatan masyarakat yang terkena musibah banjir, beliau mengatakan “adanya pengembangan sistem dari pihak BPBD sangat membantu karna pihak BPBD bisa dengan cepat mendapatkan informasi dan memberikan

bantuan. Menurut saya bentuk pengembangan BPBD ini sangat bijak tentunya bermanfaat dan tidak mempersulit masyarakat”.

4.2 Pembahasan

Di bagian ini hasil dari penyajian data yang akan dianalisis dengan tetap mengacu kepada hasil data tersebut sesuai dengan fokus yang ada dalam penelitian. Seluruh data yang disajikan diperoleh selama penelitian, baik dengan melakukan wawancara kepada informan penelitian yang akan berkaitan dengan permasalahan yang ingin dijawab yaitu tentang Fungsi Organizing Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam mengatasi Bencana Banjir Di Kabupaten Serdang Bedagai.

4.2.1 Adanya Perencanaan Kegiatan Penanggulangan bencana dan Menyiapkan Program kegiatan

Menurut Tjokroamidjojo (dalam Syafalevi, 2011:28) perencanaan dalam arti seluas-luasnya merupakan suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efektif dan efisien. (Elviza, 2018)

Menurut Prajudi Atmosudirjo dalam Husaini Usman (2008) juga berpendapat bahwa perencanaan adalah perhitungan dan penentuan tentang sesuatu yang akan dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu, siapa yang melakukan, bilamana, di mana, dan bagaimana cara melakukannya. (Taufiqurokhman, 2008)

Menurut Terry (dalam Riyadi, 2005 : 3), perencanaan adalah upaya untuk memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang di perhatikan untuk mencapai hasil yang di inginkan.(Elviza, 2018)

Berdasarkan teori tersebut penulis menilai bahwa perencanaan dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan Kepala Pelaksana terhadap staff dalam menjalankan Fungsi Organizing itu ada, dalam melaksanakan Fungsi Organizing kepala pelaksana selain memberi arahan secara langsung juga adanya perencanaan yang akan mereka lakukan.

Sebagaimana diuraikan pada penyajian data yang menguraikan tentang hasil wawancara di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Serdang Bedagai dalam kaitannya dengan hasil wawancara tentang penanggulangan dalam mengatasi bencana banjir mengenai organizing, adanya perencanaan yang dibuat dalam melaksanakan organizing dengan cara memberi arahan secara langsung juga perencanaan yang telah dibuat hal ini dibuktikan data wawancara yang penulis lakukan dengan narasumber Bapak Sukma Permana,SE,M.Si, Bapak Marnangkok Gultom,SP,M.Si pada 5 Juli 2023 selaku kepala pelaksana, kepala bidang pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana,dan perencana ahli bidang Kab Serdang Bedagai yang mengatakan bahwa adanya perencanaan dalam melaksanakan fungsi organizing.

Berdasarkan data tersebut penulis menilai bahwa adanya perencanaan di dalam fungsi organizing BPBD di Kabupaten Serdang Bedagai. Selain arahan secara langsung juga adanya perencanaan yang mereka buat untuk

penanggulangan dalam mengatasi bencana banjir yang dilakukan kepala pelaksana dalam melakukan organizing dengan staff pegawai lainnya serta kurangnya komunikasi dan anggaran dari BNPB pusat, itulah yang terjadi kendala kepala pelaksana ketika akan melakukan organizing dengan staff pegawai lainnya. Untuk mengatasi kendala tersebut kepala pelaksana harus lebih aktif melakukan komunikasi dengan staff pegawai begitu juga sebaliknya.

Dan dalam perencanaan untuk melaksanakan penanggulangan dalam mengatasi bencana banjir kepala pelaksana mengarahkan staff pegawai terlebih dahulu untuk mengumpulkan beberapa perwakilan masyarakat juga orang-orang penting untuk melakukan musyawarah untuk membahas mengenai banjir yang sering terjadi di kabupaten serdang bedagai. Setelah mendapatkan hasil musyawarah tersebut maka hasil tersebut akan menjadi landasan untuk perencanaan yang akan dilakukan di kabupaten serdang bedagai.

4.2.2 Adanya Strategi Pengumpulan Data dan Informasi tentang Kondisi Wilayah, Potensi Bencana serta kebutuhan Masyarakat.

Menurut David (2011:18-19) Strategi adalah sarana bersama dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai..(Soliz et al., 2011)

Menurut SP. Siagian (2002 : 151) adalah tercapainya suatu sasaran yang telah ditentukan pada waktunya dengan menggunakan sumber-sumber data tertentu yang dialokasikan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan organisasi tertentu. (M.Steers, 2001)

Definisi fungsi menurut Zainal (2008:22), yaitu fungsi adalah sebagai suatu aspek khusus dari suatu tugas tertentu. (Yogi Priyanto, 2014)

Berdasarkan teori tersebut penulis menilai bahwa kejelasan strategi pencapaian tujuan yang dilakukan kepala pelaksana BPBD kabupaten Serdang Bedagai hampir berjalan dengan baik. Dikarenakan strategi yang dibuat kepala pelaksana BPBD kabupaten Serdang Bedagai untuk mencapai tujuan hampir maksimal sehingga dapat diartikan kurang dalam penguatan kelembagaannya.

Sebagaimana yang telah diuraikan pada sub penyajian data yang menguraikan tentang hasil wawancara di kantor BPBD Kabupaten Serdang bedagai. Pelaksanaan strategi yang dibuat oleh kepala pelaksana tidak berjalan dengan maksimal hal ini dapat dibuktikan dari wawancara yang dilakukan penulis pada 17 April 2023 dengan Bapak Sukma Permana,SE,M.Si dan Bapak Marnangkok Gultom,SP,M.Si, selaku Sekretaris dan Kepala Bidang Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana yang mengatakan bahwa pelaksanaan strategi kurang maksimal. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan strategi tersebut adalah kurangnya komunikasi antar perangkat desa.

Pengumpulan data dan informasi tentang kondisi wilayah, potensi bencana, dan kebutuhan masyarakat merupakan langkah kritis dalam perencanaan dan pelaksanaan penanggulangan bencana yang efektif. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi tersebut: Sumber Data Sekunder: Mengumpulkan informasi dari sumber data sekunder adalah langkah awal yang penting. Data sekunder

adalah informasi yang telah dikumpulkan atau dipublikasikan oleh lembaga, pemerintah, atau organisasi lain sebelumnya. Sumber data sekunder dapat berupa laporan bencana sebelumnya, peta risiko bencana, data cuaca, data iklim, data demografi, infrastruktur wilayah, dan lain-lain.

Pemanfaatan data sekunder mempercepat proses analisis dan memahami karakteristik wilayah serta potensi risiko bencana yang mungkin terjadi. **Survei Lapangan:** Melakukan survei lapangan adalah cara langsung untuk mengumpulkan data dan informasi secara detail tentang kondisi wilayah dan kebutuhan masyarakat. Survei ini dapat mencakup wawancara dengan penduduk setempat, pemimpin komunitas, pejabat pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya.

Survei lapangan dapat membantu mengidentifikasi potensi bencana yang mungkin belum tercatat secara resmi, serta memahami kebutuhan masyarakat dan kondisi sosial-ekonomi yang dapat mempengaruhi respon terhadap bencana. **Teknologi Pemantauan:** Penggunaan teknologi seperti sensor jarak jauh (remote sensing), sistem informasi geografis (SIG), dan pemantauan dari udara (drones) dapat memberikan data visual dan spasial yang berharga tentang wilayah dan potensi bencana.

Teknologi ini memungkinkan untuk memantau perubahan lingkungan dan mendeteksi faktor risiko, seperti deforestasi, perubahan aliran sungai, atau pola cuaca ekstrim yang dapat menyebabkan bencana. **Kemitraan dan Kolaborasi:** Bekerja sama dengan berbagai pihak seperti pemerintah daerah, lembaga penelitian, LSM, dan organisasi masyarakat setempat dapat memperkuat pengumpulan data dan informasi. Kemitraan ini memungkinkan

akses lebih banyak ke sumber daya, keahlian, dan jaringan untuk mengumpulkan data yang lebih komprehensif dan beragam. Penggunaan Aplikasi dan Platform Online: Teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi alat yang sangat berguna dalam pengumpulan data dan informasi.

Penggunaan aplikasi seluler atau platform online dapat memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan potensi bencana, kondisi wilayah, atau kebutuhan yang mendesak. Data yang diperoleh melalui aplikasi ini dapat diintegrasikan ke dalam sistem manajemen informasi bencana yang lebih luas. Analisis Data dan Permodelan: Mengumpulkan data saja tidak cukup, analisis data dan permodelan bencana diperlukan untuk menginterpretasikan informasi yang dikumpulkan. Analisis data dapat membantu mengidentifikasi pola, tren, dan relasi antar variabel. Sementara permodelan bencana menggunakan data dan teknik ilmiah untuk memprediksi potensi bencana di masa depan dan mengidentifikasi wilayah yang rentan.

Dengan menggabungkan berbagai strategi di atas, para pemangku kepentingan dapat memiliki gambaran yang lebih komprehensif tentang kondisi wilayah, potensi bencana yang ada, serta kebutuhan masyarakat. Informasi yang tepat waktu dan akurat ini akan menjadi dasar yang kuat untuk merancang rencana penanggulangan bencana yang efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan data tersebut penulis dapat menilai bahwa strategi yang disusun relatif sudah cukup baik serta dalam pelaksanaannya hampir berjalan dengan baik. Kepala pelaksana harus meningkatkan partisipasi dari staff pegawai lainnya agar dapat mewujudkan hal tersebut yang dapat dilakukan

adalah dengan menciptakan suasana kekeluargaan dikantor BPBD, sehingga pada saat melakukan organisasi bersama staff pegawai bisa lebih aktif lagi dengan adanya suasana yang sudah seperti keluarga, tidak sungkan lagi dalam mengemukakan pendapat dan kriteriannya serta lebih semangat lagi dalam menjalankan tugasnya masing-masing staff pegawai.

4.2.3 Adanya Pengarahan Simulasi dan Latihan Penanggulangan Bencana secara berkala

Menurut Siswanto (2007: 111) organizing merupakan adanya Pengarahan adalah suatu proses pembimbingan, pemberian petunjuk, dan instruksi kepada bawahan agar mereka bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan”(Hasibuan, 2018)

Menurut George Terry yang dikutip oleh Malayu Hasibuan (2007: 183) yang menyatakan bahwa pengarahan adalah membuat semua anggota kelompok, agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian.(Hasibuan, 2018)

Berdasarkan teori tersebut penulis menilai bahwa pengarahan yang dilakukan kepala pelaksana BPBD Kabupaten Serdang Bedagai sudah cukup maksimal tetapi dalam pelaksanaannya kurang berjalan dengan baik. Maka dapat dilihat dari kegiatan organisasi yang dilakukan kepala pelaksana BPBD.

Sebagaimana yang telah diuraikan pada penyajian data yang mengurai wawancara di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Serdang. Bentuk pengarahan yang dilakukan kepala pelaksana

terhadap staff pegawai secara langsung akan tetapi tidak ada langkah-langkah secara khusus yang dilakukan kepala pelaksana dalam memberikan pengarahan, hal ini sudah tertera di wawancara yang penulis lakukan dengan narasumber Bapak Sukma Permana,SE,M.Si dan Marnangkok Gultom,SP,M.Si pada 5 Juli 2023 selaku Sekretaris dan kepala Kepala Bidang Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi korban Bencana yang mengatakan bahwa minimnya anggaran dan kurangnya personil kemudian partisipasi masyarakat dan dunia usaha masih kurang. Yang menonjol kendalanya untuk menjalankan organizing BPBD ini supaya berfungsi sebagaimana mestinya atau bisa menjalankan tugas-tugas pokok dan fungsinya secara maksimal.

Pengarahan Simulasi dan Latihan Penanggulangan Bencana secara berkala merujuk pada kegiatan rutin yang dilakukan oleh pihak terkait untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai bencana alam atau insiden darurat lainnya. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa tim penanggulangan bencana, petugas, dan pihak terkait lainnya dapat merespons dengan cepat, efisien, dan terkoordinasi ketika terjadi situasi darurat. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang pengarahan simulasi dan latihan penanggulangan bencana secara berkala:

- Simulasi Bencana: Simulasi adalah metode latihan yang memungkinkan para peserta untuk melibatkan diri dalam skenario bencana atau insiden darurat secara virtual atau bermain peran. Simulasi ini didasarkan pada skenario yang realistis dan mungkin melibatkan perangkat lunak khusus, papan permainan, atau bahkan model fisik. Dalam simulasi, peserta dapat menghadapi tantangan yang

sama dengan situasi darurat nyata dan belajar untuk mengambil keputusan yang tepat, berkoordinasi dengan rekan tim, dan mengelola sumber daya dengan efisien.

- **Latihan Lapangan:** Latihan lapangan merupakan bentuk latihan yang lebih langsung dan melibatkan peran aktif dari para peserta. Biasanya, latihan ini dilakukan di lokasi yang sesuai dengan skenario bencana yang dipilih. Para peserta akan berhadapan dengan situasi yang lebih realistis dan harus bekerja sama dalam mengatasi masalah, menyusun strategi, dan bertindak sesuai prosedur penanggulangan bencana yang telah ditetapkan.
- **Replikasi Keadaan Darurat:** Dalam latihan berkala, upaya dilakukan untuk mereplikasi situasi bencana sebanyak mungkin agar para peserta dapat terbiasa dan terlatih dalam menghadapinya. Misalnya, penggunaan bangunan atau wilayah yang dibuat menyerupai keadaan pasca bencana, penggunaan suara dan efek visual untuk menciptakan suasana darurat, atau bahkan melibatkan aktor sebagai korban atau penduduk setempat yang memerlukan bantuan.
- **Evaluasi dan Pelaporan:** Setelah latihan selesai, evaluasi menyeluruh dilakukan untuk menilai kinerja individu dan tim dalam menghadapi simulasi atau situasi latihan bencana. Melalui evaluasi ini, dapat diidentifikasi kekuatan dan kelemahan, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan penyempurnaan untuk latihan selanjutnya.
- **Periode Berkala:** Latihan penanggulangan bencana dilakukan secara berkala, yang berarti diadakan secara teratur sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Jangka waktu antara latihan dapat bervariasi, tergantung

pada kebutuhan dan kompleksitas wilayah atau jenis bencana yang mungkin terjadi. Dengan melaksanakan latihan secara rutin, kesiapsiagaan dan kemampuan para pihak terlibat dapat terus ditingkatkan, sehingga waktu respons dan koordinasi dapat dioptimalkan ketika bencana atau keadaan darurat benar-benar terjadi.

- Penting untuk dicatat bahwa latihan berkala ini melibatkan kolaborasi dan koordinasi antara berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah, tim penanggulangan bencana, tim medis, dan organisasi sukarelawan. Semakin sering latihan dilakukan dan semakin realistis skenarionya, semakin siap pula masyarakat dan instansi dalam menghadapi bencana dan menyelamatkan nyawa serta harta benda dengan lebih efektif.
- Berdasarkan data tersebut penulis menilai bahwa adanya pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap bidang-bidang, tugas atasan mengorganisasikan semua staff pegawai yang ada dibawah tanggung jawabnya secara langsung. Pengarahan yang dilakukan kepala pelaksana BPBD Kabupaten Serdang Bedagai yaitu dengan pengarahan secara langsung, terkait dengan apakah pernah memberikan langkah-langkah strategi kepada bawahannya kepala pelaksana tidak pernah memberikan langkah-langkah strategi. Ada beberapa kendala yaitu kurangnya motivasi semangat dalam komunikasi sesama perangkat desa sehingga sering terjadi kesalah pahaman antara kepala pelaksana dengan staff pegawai lainnya. Untuk mengatasi kendala tersebut kepala desa harus lebih aktif berkomunikasi langsung dengan perangkat harus memberikan motivasi baik berupa dorongan semangat, berupa saling

membantu dalam kerja sama untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik.

4.2.4 Adanya kerjasama pengembangan sistem informasi bencana sebagai alat mempercepat proses pengumpulan data dan informasi

Kerja sama kelompok dalam organisasi atau perusahaan juga dapat terwujud dengan adanya pembinaan hubungan kerja, baik hubungan kerja antara para anggota organisasi atau perusahaan maupun antara pimpinan organisasi atau perusahaan dengan bawahannya atau anggota yang lain. Sasaran pembinaan hubungan kerja dalam organisasi atau perusahaan adalah tercapainya kerja sama yang kompak dan harmonis antara sesama anggota organisasi atau sumber daya manusia yang ada. (Andi Fachruddin, 2012)

Menurut Landsberger (2011) kerjasama atau belajar bersama adalah proses berkelompok dimana anggotaanggotanya mendukung dan saling mengandalkan untuk mencapai suatu hasil mufakat. Selain itu kemampuan kerjasama mampu meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berinteraksi, serta melatih peserta didik beradaptasi dengan lingkungan baru. (Rachman, 2018)

Berdasarkan teori tersebut penulis menilai yang dilakukan kepala pelaksana BPBD kabupaten serdang bedagai bahwa kerja sama yang dilakukan belum sempurna atau kurang baik karena didalam melakukan pekerjaan antar staff pegawai masih sering terjadi adanya komunikasi yang kurang baik Sebagaimana yang telah diuraikan pada penyajian data yang

diuraikan tentang hasil wawancara di kantor BPBD kabupaten serdang bedagai.

Bentuk kerjasama yang sangat membantu organisasi ini dengan adanya Pengembangan sistem informasi bencana merupakan langkah penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengumpulan data dan informasi terkait bencana. Sistem informasi bencana adalah platform atau perangkat lunak yang dirancang khusus untuk mengintegrasikan, menyimpan, mengelola, dan menganalisis data terkait bencana. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari pengembangan sistem informasi bencana:

1. **Pemantauan Real-time:** Sistem informasi bencana memungkinkan pengumpulan data secara real-time. Informasi tentang potensi bencana, kondisi wilayah, atau keadaan darurat dapat dengan cepat diunggah dan dibagikan oleh berbagai pemangku kepentingan seperti petugas penanggulangan bencana, masyarakat, dan relawan.
2. **Akses Terpusat:** Dengan sistem informasi bencana, data dan informasi terkait bencana dapat diakses dari satu tempat terpusat. Hal ini memudahkan para pemangku kepentingan untuk memperoleh informasi yang konsisten dan akurat, yang kemudian dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang tepat dan merancang respon bencana yang efektif.
3. **Integrasi Data Multi-sumber:** Sistem informasi bencana dapat mengintegrasikan data dari berbagai sumber, termasuk data cuaca, data sensor jarak jauh, data sosial-ekonomi, dan data lapangan lainnya.

Dengan demikian, sistem ini menyediakan gambaran yang lebih lengkap tentang potensi bencana dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dampaknya.

4. Analisis dan Prediksi: Data yang terkumpul dalam sistem informasi bencana dapat dianalisis dan dimodelkan untuk memprediksi potensi risiko bencana di masa depan. Analisis ini membantu dalam merencanakan langkah-langkah mitigasi yang tepat dan mempersiapkan respon darurat yang efektif.
5. Koordinasi dan Kolaborasi: Dengan sistem informasi bencana, kolaborasi dan koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan menjadi lebih mudah. Semua pihak yang terlibat dapat saling berbagi informasi, saling mendukung, dan berkoordinasi secara lebih baik dalam menghadapi bencana.
6. Manajemen Logistik dan Sumber Daya: Sistem informasi bencana dapat membantu dalam manajemen logistik dan sumber daya. Informasi tentang distribusi bantuan, lokasi evakuasi, atau pergerakan pasukan penanggulangan bencana dapat diatur dan dipantau dengan lebih efisien.
7. Pelaporan dan Evaluasi: Sistem informasi bencana memfasilitasi pelaporan dan evaluasi keberhasilan respon bencana. Data tentang efektivitas langkah-langkah penanggulangan dapat dipantau dan dinilai, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan penyempurnaan di masa mendatang.

Dalam era teknologi informasi dan komunikasi saat ini, pengembangan sistem informasi bencana menjadi semakin penting untuk memastikan

respons yang cepat dan efektif dalam menghadapi bencana. Penggunaan teknologi ini dapat membantu menyelamatkan nyawa, mengurangi kerugian, dan memperkuat ketahanan masyarakat dalam menghadapi tantangan bencana alam dan insiden darurat lainnya.

Dengan hasil wawancara tentang adanya kerja sama yang dilakukan sesama staff pegawai, maka apabila dianalisis hasil wawancara tersebut, maka dikaji secara konseptual, dimana kerja sama yang dilakukan staff pegawai BPBD kabupaten serdang bedagai masih belum bisa dikatakan baik walaupun bentuk kerja samanya sudah cukup baik, tetapi didalam pelaksanaann kerja sama yang dilakukan belum cukup baik karena kurangnya komunikasi sesama staff pegawai.

Berdasarkan data tersebut penulis menilai bahwa kerja sama yang dilakukan kepala pelaksana dengan staff pegawai yaitu dengan bentuk kerja sama kerukunan, saling menghargai sesame staff pegawai. Dengan cara lebih memahami keadaan maupun situasi dan kondisi lingkungan kerja. Juga menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dengan begitu dapat membuat kerja sama yang baik. Terdapat beberapa kendala dalam melakukan kerja sama antar kepaa pelaksana dengan staff pegawai yaitu masih kurangnya komunikasi sehingga sering terjadi tidak maksimalnya dalam pengerjaan. Untuk mengatasi kendala tersebut maka kepala pelaksana dalam berkomunikasi terhadap staff pegawai agar tidak ada lagi kendala dan kesalah pahaman dalam menjalannkan tugasnya masing-masing.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis dapat diketahui bahwa organizing dalam penanggulangan bencana banjir yang dilakukan kurang efektif. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:

Pertama Mengurangi dampak yang ditimbulkan, khususnya bagi penduduk, Sebagai landasan (pedoman) untuk perencanaan pembangunan, Meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak/risiko bencana, sehingga masyarakat dapat hidup dan bekerja dengan aman.

Kedua dengan adanya strategi pencapaian tujuan yang tidak efektif dalam hal pelaksanaannya. Dalam hal ini kepala pelaksana memiliki strategi yang cukup baik tetapi dalam pelaksanaannya kepala pelaksana maupun staff pegawai lainnya tidak dapat menjalankan strategi tersebut dengan baik sehingga penanggulangan dalam mengatasi bencana banjir tidak berjalan dengan semestinya dan tujuan pemerintahan kota tidak tercapai. Dengan demikian strategi yang dimiliki kepala pelaksana tidak berjalan efektif.

Ketiga dengan adanya pengarahannya langsung yang dilakukan kepala pelaksana sudah cukup maksimal tetapi dengan pelaksanaannya tidak berjalan dengan baik. Kepala pelaksana hanya memberikan arahan kepada staff pegawai lainnya namun staff pegawai tidak dapat menjalankan arahan yang telah diberikan kepala pelaksana. Maka dengan demikian pengarahannya langsung yang diberikan kepala pelaksana terhadap perangkat desa tidak efektif.

Keempat dengan adanya kerja sama, untuk kerja sama antar staff pegawai belum bisa dikatakan dengan baik karena masih sering terjadi kesalah pahaman sesama staff pegawai, hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan para narasumber. Lebih baik staff pegawai memiliki saran keterbukaan untuk mengenai pemerintahan kota agar tidak terjadi kesalah

pahaman yang dapat merusak kerja antar staff pegawai lainnya. Maka demikian kerja sama yang dilakukan tidak berjalan dengan efektif.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang akan dilakukan mengenai Fungsi Organizing Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Mengatasi Bencana Banjir Di Kabupaten Serdang Bedagai sudah berjalan sesuai dengan fungsinya tetapi masih belum efektif. Hal ini didasari kategorisasi antara lain:

1. Adanya Perencanaan Kegiatan Penanggulangan Bencana dan Menyiapkan Program Kegiatan relatif telah berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Dalam pelaksanaan fungsi Organizing Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) masih belum efektif karena tidak adanya perencanaan khusus yang dilakukan kepala pelaksana kepada staff pegawai sehingga kurang maksimalnya organisasi yang dilakukan.
2. Adanya Strategi Pengumpulan data dan Informasi tentang Kondisi Wilayah, Potensi Bencana serta Kebutuhan Masyarakat relatif sudah cukup baik. Walaupun minim anggaran, kurangnya personil kelompok dalam melakukan pengumpulan data serta kurangnya penguatan kelembagaan.
3. Adanya Penarahan Simulasi dan Latihan Penanggulangan Bencana Secara Berkala relatif sudah cukup maksimal. Dikarenakan kepala pelaksana selalu memberikan motivasi kepada staff pegawai sehingga staff pegawai dapat melaksanakan tugasnya sesuai tugas pokok dan fungsi. Dan juga kepala pelaksana memberi rasa aman dan nyaman kepada bawahan seperti, selalu melakukan pendekatan dengan cara mengajak bawahan untuk selalu berdiskusi tentang permasalahan yang ada.

4. Adanya Kerjasama Pengembangan sistem informasi bencana sebagai alat mempercepat proses pengumpulan data dan informasi relatif belum bisa dikatakan baik. Hal ini bisa dilihat dari jawaban narasumber yang mengatakan minimnya anggaran dan kurangnya personil kelompok di setiap bidangnya.
5. Organizing Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang dilakukan kepala pelaksana Di Kabupaten Serdang Bedagai relatif belum berjalan secara efektif, dapat dilihat karna tidak ada perencanaan khusus, strategi pencapaian tujuan belum maksimal, serta kerja sama yang dilakukan belum efektif.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk melakukan Organizing Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam mengatasi bencana banjir sebaiknya kepala pelaksana membuat perencanaan khusus terlebih dahulu supaya pelaksanaan organisasi berjalan dengan baik dan maksimal.
2. Dalam melakukan strategi pengumpulan data memang sudah efektif, tetapi dengan adanya anggaran tambahan dan bertambahnya personil kelompok agar pelaksanaan yang dilakukan bisa lebih efektif.
3. Diharapkan kepala pelaksana bisa lebih memaksimalkan untuk meluangkan waktu atau selalu memberi arahan kepada staff pegawai sehingga kegiatan penanggulangan bencana banjir bisa berjalan dengan baik.

4. Berharap bisa menjalin kerja sama yang baik antar sesama staff pegawai dengan terciptanya hubungan yang baik sehingga tercapainya tujuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Fachruddin. (2012). Membangun kerjasama tim. 4, 7787(8.5.2017), 2003–2005.
- Elviza, R. (2018). Perencanaan Sosial. *UIN Suska Riau*, 27(7), 16–38.
[http://repository.uin-suska.ac.id/13156/7/7.BAB II_2018384ADN.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/13156/7/7.BAB%20II_2018384ADN.pdf)
- Hasibuan, M. (2007). Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. *PT.Bumi Aksa*.
- Hasibuan, M. (2018). *deskripsi teori dan penelitian yang relevan*. 53(9), 1689–1699.
- J, W. (2011). *organisasi dan pengorganisasian*. Kharisma Putra Utama Offset.
[https://mahasiswa.ung.ac.id/921412196/home/2013/5/31/organisasi_dan_pengorganisasi.html#:~:text=2.1 Pengertian Organisasi dan Pengorganisasian&text=Pengorganisasian merupakan fungsi kedua dalam,sumber-sumber%2C dan lingkungannya.](https://mahasiswa.ung.ac.id/921412196/home/2013/5/31/organisasi_dan_pengorganisasi.html#:~:text=2.1%20Pengertian%20Organisasi%20dan%20Pengorganisasian&text=Pengorganisasian%20merupakan%20fungsi%20kedua%20dalam,sumber-sumber%2C%20dan%20lingkungannya.)
- Kho, B. (2018). *prinsip organisasi*. Manajenen Industri.Com.
<https://ilmumanajemenindustri.com/pengertian-pengorganisasian-organizing-prinsip-pengorganisasian/?amp=1>
- Ligal. (2008). *Pendekatan Pencegahan dan Penanggulangan Banjir*. 8, 2.
- M.Steers, R. (2001). Eefektivitas. *Ilmiah*, 7–25.
- Puspoprato, S. (2006). Manajemen Bisnis, Konsep, teori, dan Aplikasi. Penerbit PPM. <https://aiszaki.com/2019/11/15/pengorganisasian/>
- rachma buana. (2014, October 2). *pengertian perorganisasian atau organizing dan defenisi struktur organisasi (psikologi managemnet)*.

Elearning.Gunadarma.Ac.I.

- Rachman, T. (2018). Pengertian Kerjasama. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 10–27.
- Riantika, H. (2021). Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kelurahan Lewaja Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. *Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar*.
- Soliz, F., Fe, S., Aires, B., BOERSEN, A. C., Pública, F., Proyecto, D. E. L., Del, T., Obtención, P., Sangre, D. E. H. D. E., Por, D., Nedjaoum, F., Dhulster, P., Fatah, N., Guillochon, D., Legrand, C., Lepley-Legrand, M.-P., DE, T., Zamora Rodríguez, L. M., Vargas-rosa, N., ... Jiménez, M. (2011). LANDASAN TEORI DEFINISI STRATEGI. *Revista de Química*, 9(1), 1–14. http://cticcita.es/fileadmin/redactores/Explora/Tecnica_valoriz_ANICE.pdf <http://bvssan.incap.org.gt/local/file/T469.pdf> <https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/1586/15/UPSCT002019.pdf> <http://www.bdigital.unal.edu.co/6259/> <http://onlinelib>
- Taufiqurokhman. (2008). Konsep dan Kajian Ilmu Perencanaan. *Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama*, 1–106. <http://fisip.moestopo.ac.id/storage/Buku/buku-04-taufiquokhman-konsep-dan-kajian-ilmu-perencanaan-belum-isbn.pdf>
- Wahyu, A. (2018). Manajemen Persatuan Sepak Bola Indonesia Batang (Persibat) Dalam Kompetisi Liga 2 Tahun 2017. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Wijaya, C. (2016). *Fungsi Manajemen Organizing*.

Yogi Priyanto. (2014). Landasan Teori Fungsi. *Landasan Teori Fungsi*, 2-, 1–15.

[https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:OmM2rbSWrpEJ:h
ttps://eprints.umm.ac.id/41375/3/BAB%2520II.pdf+&cd=15&hl=id&ct=clnk
&gl=id](https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:OmM2rbSWrpEJ:h
ttps://eprints.umm.ac.id/41375/3/BAB%2520II.pdf+&cd=15&hl=id&ct=clnk
&gl=id)

Undang-undang :

Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana Daerah.-

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bisa menjawab surat ini agar diterbitkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi, Jalan Mukhtar Sasri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

https://fisip.umsu.ac.id fisip@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Sk-1

**PERMOHONAN PERSETUJUAN
JUDUL SKRIPSI**

Kepada Yth.
Bapak/Ibu
Ketua Program Studi
FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 16 Februari 2023

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Mayang Sari
N P M : 1903100017
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Tabungan sks : 148 sks, IP Kumulatif 3.34.

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Fungsi organizing Badan Penanggulangan Bencana daerah (Bpbd) dalam mengatasi Bencana banjir di kabupaten Gedang Bedagai	16/2 2023 See
2	Implementasi kebijakan program Bedah rumah Dalam rangka Penertarikan kemiskinan	
3	Implementasi kebijakan tertib sosial di kota Medan	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik / Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Program Studi :

Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tgl. 16 Februari 2023

Ketua,

(Ananda Achardika S. Sos., M.P.)
NIDN:

ps: Dr. Syafira.

032

Pemohon

(Mayang Sari)

Dosen Pembimbing yang ditunjuk
Program Studi.....

(Dr. H. Syafira M. Si., Phd.)
NIDN:



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dikembangkan dari hasil penelitian dan pengembangan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Sk-2

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
 DAN PEMBIMBING**
Nomor : 278/SK/II.3.AU/UMSU-03/F/2023

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 1231/SK/II.3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : **16 Februari 2023**, dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **MAYANG SARI**
 N P M : 1903100017
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Semester : VIII (Tujuh) Tahun Akademik 2022/2023
 Judul Skripsi : **FUNGSI ORGANIZING BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) DALAM MENGATASI BENCANA BANJIR DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

Pembimbing : **Assoc. Prof. Drs. H. SYAFRIZAL., M.Si., Ph.D.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi FISIP UMSU sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 1231/SK/II.3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 032.19.310 tahun 2023.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 16 Februari 2024.

Ditetapkan di Medan,
 Pada Tanggal, 02 Sya'ban 1444 H
 23 Februari 2023 M

Medan,

Dr. ARIFIN SALEH., S.Sos., MSP.
 NIDN. 0030017402



Tembusan :

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal.





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila membaca surat ini agar dilakukan
hormat dan langganannya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XU/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fkip.umu.ac.id> fisip@umu.ac.id [fkip.umu.ac.id](#) [fkip.umu.ac.id](#) [fkip.umu.ac.id](#) [fkip.umu.ac.id](#) [fkip.umu.ac.id](#) [fkip.umu.ac.id](#)

Sk-3

**PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Kepada Yth.

Medan, 14 Maret 2023

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Mayang Sari
N P M : 1903100017
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor. 32.../SK/II.3.AU/UMSU-03/F/2023. tanggal 14 Maret 2023 dengan judul sebagai berikut :

Fungsi Organizing Badan penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
dalam mengatasi Bencana Banjir di Kabupaten Serdang Bedagai

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM (Transkrip Nilai Sementara) yang telah disahkan;
4. Foto Copy Kartu Hasil Studi (KHS) Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :
Pembimbing

(Drs. H. Syarifal M. Si, Ph.D)

NIDN:

Pemohon,

(Mayang Sari)





UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 477/JUND/IL.3.AU/UMSU-03/F/2023

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Jum'at, 17 Maret 2023
Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Aula FISIP UMSU Lt. 2
Pemimpin Seminar : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP.

Nc.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PEMANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
11	WILDA HAFIDZAH	1903100072	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	Dr. SITI HAJAR, S.Sos., M.SP.	STRATEGI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DALAM PENERAPAN PROGRAM E-MUSREMBANG DI KECAMATAN BINJAI SELATAN
12	YULFANI INDRIAWATI	1903100071	NALIL KHARIAH, S.IP., M.Pd.	Dr. SITI HAJAR, S.Sos., M.SP.	STRATEGI ORGANIZING DALAM OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM PATEN (PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN) DI KECAMATAN MEDAN AMPLAS
13	SARAYA FILDZAH	1903100044	JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	RAFIEQAH NAJAR RIZKY, S.Sos., M.A.	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN DELI SERDANG
14	RAHMAD SYAH AULIA TANJUNG	1903100034	RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	Assoc. Prof. Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D.	IMPLEMENTASI KEBUJUKAN TERTIB SOSIAL DI KOTA MEDAN
15	WYANG SARI	1903100017	JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	Assoc. Prof. Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D.	FUNGSI ORGANIZING BADAN PENAGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) DALAM MENGATASI BENCANA BANJIR DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Medan, 22 Sya'ban 1444 H
15 Maret 2023 M



*Ace u/dilaksanakan
di lapangan 30/03/05*

Asst. Syarif. Ph.D

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA

FUNGSI ORGANIZING BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD) DALAM MENGATASI BENCANA BANJIR DI KABUPATEN SERDANG
BEDAGAI

1. Adanya Perencanaan kegiatan penanggulangan bencana dan menyiapkan program kegiatan

- a) Bagaimana perencanaan yang dilakukan organizing badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) dalam mengatasi bencana banjir?
- b) Apakah kendala yang dihadapi dalam perencanaan organizing badan penanggulangan bencana daerah (BPBD)?
- c) Bagaimana cara mengatasi kendala tersebut?

2. Adanya Strategi Pencapaian Tujuan

- a) Strategi apa saja yang dilakukan dalam meningkatkan organizing badan penanggulangan bencana daerah (BPBD)?
- b) Bagaimana strategi dalam mengorganisasikan anggota untuk membahas mengenai bencana banjir?
- c) Kendala apa saja yang dihadapi dalam menjalankan organizing?

3. Adanya Pengarahan

- a) Bagaimana bentuk pengarahan yang dilakukan kepala pelaksana dalam mengorganisasikan anggota dengan tujuan membahas mengatasi bencana banjir?
- b) Dalam melakukan pengarahan apakah kepala pelaksana pernah memberikan langkah-langkah strategi kepada anggotanya?

- c) Apakah kendala yang dihadapi dalam memberikan pengarahan dan bagaimana cara mengatasi kendala-kendala tersebut?

4. Adanya Kerjasama

- a) Bagaimana bentuk kerjasama yang dilakukan kepala pelaksana dengan anggota dalam mengatasi bencana banjir?
- b) Kendala apa saja yang dihadapi dalam melakukan kerjasama antara kepala pelaksana dengan anggota?
- c) Bagaimana cara mengatasi kendala dalam meningkatkan kerjasama kepala pelaksana dengan anggota?



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id>

fisip@umsu.ac.id

[umsu](#)

[umsu](#)

[umsu](#)

[umsu](#)

Nomor : 985/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2023

Medan, 24 Dzulqaidah 1444 H

Lampiran : -,-

13 Juni 2023 M

Hal : *Mohon Diberikan izin
Penelitian Mahasiswa*

Kepada Yth : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Serdang Bedagai

di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan.

Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi, kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama mahasiswa : MAYANG SARI
N P M : 1903100017
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VIII (Delapan) / Tahun Akademik 2022/2023
Judul Skripsi : **FUNGSI ORGANIZING BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) DALAM MENGATASI BENCANA BANJIR DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan,



Cc : File.





PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
 Jalan Negara No. 300 Telp./Fax. 0621 - 442183
 SEI RAMPAH

20695

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor: 10.31/070/468/2023

Dasar : Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 985/KET/II.3.AU/UMSU.03/F/2023 Tanggal 13 Juni 2023 Hal : Izin Penelitian

MEMBERIKAN IZIN

Kepada :

Nama : Mayang Sari
 NIM : 1903100017
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Judul Skripsi : Fungsi Organizing Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Mengatasi Bencana Banjir Di Kabupaten Serdang Bedagai

- Untuk :
1. Melaksanakan kegiatan penelitian untuk keperluan penyusunan Skripsi.
 2. Kepada Kepala Dinas/Badan/Bagian/Camat di Kabupaten Serdang Bedagai kiranya dapat memberikan kemudahan untuk mendapatkan data informasi yang terkait dengan pengambilan/pengumpulan data dimaksud kepada mahasiswa bersangkutan sepanjang untuk kepentingan akademis.
 3. Diminta kepada Saudara Peneliti agar data dan informasi hanya digunakan sebagai bahan penyusunan Skripsi.
 4. Setelah selesai pengambilan/pengumpulan data agar menyampaikan laporan tertulis ke Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Cq. Bappedalitbang Kabupaten Serdang Bedagai.
 5. Batas waktu pengambilan data selama 3 (tiga) bulan, setelah melampaui batas tersebut rekomendasi izin penelitian ini tidak berlaku lagi.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dimanfaatkan sesuai ketentuan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Sei Rampah
 Pada Tanggal : 19 Juni 2023

a.n. BUPATI SERDANG BEDAGAI
 Pth. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
 KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,



Tembusan Yth:

1. Bapak Bupati Serdang Bedagai ;
2. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
3. Peringgal.



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Alamat : Jln. Negara Km 58 Desa Firdaus Fax. 0621 – 4440700 Kec. Sei Rampah
 (Komplek Perumahan Bumi Sergai)

20995

SURAT IZIN PENELITIAN
 Nomor : 18.35/ *CPD* / 1184/2023

- Dasar:
1. Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 985/KET/II.3.AU/UMSU.03/F/2023 Tanggal 13 Juni 2023 Hal : Izin Penelitian.
 2. Surat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Nomor 18.31/070/468/2023 Tanggal 19 Juni 2023 Perihal Surat Izin Penelitian.

MEMEBERIKAN IZIN

Kepada :

Nama : Mayang Sari
 NIM : 1903100017
 Program studi : Ilmu Administrasi Publik
 Judul Skripsi : Fungsi Organizing Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Mengatasi Bencana Banjir di Kabupaten Serdang Bedagai

Untuk : Melaksanakan kegiatan penelitian untuk keperluan Skripsi

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dimanfaatkan sesuai ketentuan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Sei Rampah
 Pada tanggal : 04 Juli 2023

PIL. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Serdang Bedagai

Frits
FRITS UEKI PRAPANCA DAMANIK, SE, M.Si
PEMBINA
NIP. 19780601 200312 1 004



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PERPUSTAKAAN

Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No. 00059/LAP/PT/IX.2018
 Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567
 NPP. 12712021000003 • <http://perpustakaan.umsu.ac.id> ✉ perpustakaan@umsu.ac.id 📞 [perpustakaan_umsu](tel:06166224567)

SURAT KETERANGAN

Nomor : 934/ KET/II.3-AU /UMSU-P/M/2023

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : MAYANG SARI
NPM : 1903100017
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 11 Dzulqad'ah 1444 H.
 31 Mei 2023 M.

Kepala UPT Perpustakaan



Muhammad Arifin, S.Pd, M.Pd



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Diteguhkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul: Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/IRAN-PT/Ak.KP/PT/XXI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 8622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://filsip.umsu.ac.id | fisp@umsu.ac.id | umsumedan | umcumedan | umsumedan | umsumedan

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : Mayang Sari
N P M : 1903100017
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Judul Skripsi : Fungsi organizing Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam mengatasi bencana banjir di kabupaten serdang bedagai

No.	Tanggal	Kegiatan/Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	21/2/2023	konultasi judul skripsi	
2.	3/3/2023	Bimbingan proposal	
3.	7/3/2023	Bimbingan proposal	
4.	23/5/2023	Bimbingan proposal	
5.	6/6/2023	Acc proposal	
6.	23/6/2023	Acc draft wawancara	
7.	12/8/2023	Bimbingan skripsi	
8.	18/8/2023	Bimbingan skripsi	
9.	25/8/2023	Acc skripsi	

Medan, 25 Agustus 2023

Ketua Program Studi,
Dr. Anik Satrio S.Sos, MSP
NIDN: 0190017402

Pembimbing,
Amanda Mahendra, S.Sos, MSP
NIDN: 0190017402

Pembimbing,
Assoc. Prof. Dr. H. Supriatna, M.SiP.
NIDN: 0190017402





UMSU

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI
Nomor : 1600/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2023

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Kamis, 31 Agustus 2023
Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Aula FISIP UMSU LL 2



Sk-10

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENJURI			Judul Skripsi
			PENJURI I	PENJURI II	PENJURI III	
15	MAYANG SASI	1903100017	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	IDA MARTINELY, SH., MM	Asoc. Prof. Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D.	FUNGSI ORGANIZING BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) DALAM MENGGATASI BENCANA BANJIR DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
17						
18						
19						
20						

Lowis Setiye

Medan, 11 Safar 1445 H
28 Agustus 2023 M

Ditandatangani oleh:
As. Rektor
Panitia Ujian
Prof. Dr. Achmad Arifin, SH, M.Hum

Ketua,
Dr. Arifin Saleh, S.Sos., M.S.P.



Panitia Ujian
Sekretaris
Dr. Abrar Adhani, S.Sos., M.I.Kom

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Mayang Sari
Tempat/Tanggal Lahir : Pematang Guntung, 11 April 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama/Bangsa : Islam / Indonesia
Alamat : Jln Sialang Buah Desa Pematang Guntung dusun 1
Nama Orang Tua
Ayah : Saparuddin
Ibu : Erna Wati Tampubolon
Alamat Orang Tua : Jln Sialang Buah Desa Pematang Guntung 1
Riwayat Pendidikan :
1. Tamat SD N 2 No 107441 Tahun 2013, berijazah;
2. Tamat Pondok Pesantren Mawaridussalam Tahun 2016, berijazah;
3. Tamat Madrasah Al-Washliyah 68 Pematang Guntung Tahun 2019, berijazah;
4. Kuliah pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2019 sampai sekarang.

Demikian daftar riwayat hidup ini diperbuat dengan sebenarnya.

Penulis,

Mayang Sari